



JAP | Jurnal Abdi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Menulis - Mengabdikan - Mempublikasikan

TEMA:

TATA KELOLA PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Terbitan ini mengangkat berbagai kajian tentang kolaborasi antar-stakeholder, penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, pembentukan kebijakan dan regulasi daerah, peningkatan kesadaran hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.



TATA KELOLA PUBLIK

Mendorong pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif.



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menguatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat untuk kesejahteraan bersama.



KOLABORASI STAKEHOLDER

Sinergi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media untuk pembangunan daerah.



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

ISSN 2987-5560



9

772987

556009

JURNAL ABDI PUBLIK

ISSN: 2987-5560

FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Jurnal Abdi Publik merupakan wadah publikasi ilmiah yang mengangkat berbagai persoalan tata kelola publik dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah. Naskah-naskah di dalamnya membahas kolaborasi antarpemangku kepentingan, penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, pembentukan kebijakan dan regulasi daerah, peningkatan kesadaran hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.

DITERBITKAN OLEH

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Jl. PB Sudirman No. 07, Situbondo 68312, Jawa Timur, Indonesia

Website: <https://unars.ac.id/ojs/index.php/JAP>

DOI: <https://doi.org/10.36841/jap.v5i02>

Kebijakan Akses Terbuka & Lisensi

Jurnal ini menyediakan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik akan mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar. Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International* (CC BY-SA 4.0).

TIM EDITORIAL

EDITORIAL TEAM OF "JURNAL ABDI PUBLIK"

EDITOR IN CHIEF

Dr. Giyanto, S.Ap, M.Si

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

EDITOR

Vita Novianti, Sp, M.AP

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

Usrotul Hasanah, M.Si

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

Nina Sa'idah F, M.Si

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

**Muh. Hamdi Zain, S.Sos,
M.AP**

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

**Dr. Ratna Koba Susanti,
S.Sos, M.Si**

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

SECTION EDITOR

Drs. Senain, M.Si

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

Dra. Farida Hanum, M.Si

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

**Dr. Hasan Muchtar Fauzi,
S.Sos, M.Si**

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

Dini Noor Aini, S.Sos, M.Si

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

Drs. Eddy Basuki, M.Si

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

Drs. Hari Susanto, M.Si

Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

LAYOUT EDITOR

Wahyu Karyawan, S.AP

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Diterbitkan oleh Jurnal Abdi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

DAFTAR ISI

JURNAL ABDI PUBLIK | VOL 5 NO 02 (2026)

KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG BLEKOK DI KABUPATEN SITUBONDO

 Desi Anjarwati, Vita Novianti, Dini Noor Aini

1 - 19

SOSIALISASI TUGAS DAN WEWENANG POLRI, DALAM PEMELIHARAAN KAMTIBNAS DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM BINGKAI REFORMASI POLRI

 Hasan Muhtar Fauzi

20 - 30

SOSIALISASI PENCEGAHAN BULLYING & PERNIKAHAN DINI DI SMPN 3 SITUBONDO

 Usrotul Hasanah

31 - 38

PENDAMPINGAN PEMBUATAN RAPERDA TENTANG PELAKSANAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

 Giyanto Giyanto

39 - 48

PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

 Hari Susanto

49 - 66

PENINGKATAN SDM PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM LITERASI READ ALOUD DI SEKOLAH KABUPATEN SITUBONDO

 Nina Saidah Fitriyah

67 - 83

PENGANTAR REDAKSI

JURNAL ABDI PUBLIK | VOL 5 NO 02 (2026)

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Jurnal Abdi Publik Volume 5, Nomor 02, Tahun 2026** dapat hadir di hadapan para pembaca. Terbitan kali ini secara khusus mengusung tema *Tata Kelola Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*. Tema ini kami angkat untuk menjawab berbagai dinamika sosial, tantangan birokrasi, serta peluang peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal, khususnya di kawasan Situbondo.

Edisi ini menyajikan enam artikel pilihan yang mengkaji berbagai dimensi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Diskusi diawali dengan analisis mendalam terkait kolaborasi antarpemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengembangan ekowisata Kampung Blekok. Fokus kemudian beralih pada aspek ketertiban umum dan hukum melalui sosialisasi wewenang Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas, serta pendampingan pembuatan Raperda pelaksanaan ketentraman masyarakat.

Lebih lanjut, berbagai persoalan di akar rumput turut menjadi perhatian utama dalam edisi ini. Langkah-langkah preventif untuk melindungi generasi muda dibahas melalui edukasi pencegahan *bullying* dan pernikahan dini di lingkungan sekolah menengah. Dari sudut pandang ekonomi, terdapat kajian strategis mengenai peningkatan ekonomi keluarga yang dimotori oleh pemberdayaan perempuan. Sebagai pamungkas, redaksi menyajikan tulisan mengenai penguatan kapasitas pendidikan melalui program literasi anak usia dini yang sangat krusial dalam mencetak generasi emas masa depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran redaksi, mitra bestari, serta para penulis yang telah mendedikasikan waktu dan pemikirannya. Kami menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki ruang untuk terus berkembang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para akademisi, praktisi, dan pembaca sangat kami nantikan.

Akhir kata, semoga gagasan dan inovasi yang tertuang dalam terbitan Jurnal Abdi Publik ini tidak hanya memantik diskursus akademis yang lebih luas, tetapi juga memberikan kontribusi dan manfaat nyata bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat membaca.

Situbondo, Agustus 2026

EDITOR IN CHIEF

Dr. Giyanto, S.Ap., M.Si.

KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG BLEKOK DI KABUPATEN SITUBONDO

STAKEHOLDER COLLABORATION IN THE DEVELOPMENT OF KAMPUNG BLEKOK TOURISM IN SITUBONDO REGENCY

Desi Anjarwati¹, Vita Novianti², Dini Noor Aini³

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Abdurachman Saleh Situbondo

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Abdurachman Saleh Situbondo

³Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: desianjar725@gmail.com

Abstrak. Wisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo merupakan destinasi wisata berbasis konservasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan ekosistem mangrove. Namun, pengembangan wilayah tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti penurunan jumlah kunjungan wisata, minimnya koordinasi antar stakeholder, belum optimalnya kelembagaan pengelola, dan kurangnya partisipasi aktif dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang meliputi unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholder melibatkan lima unsur dalam model pentahelix, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang diwujudkan melalui kegiatan konservasi lingkungan, promosi wisata, pemberdayaan masyarakat, program Corporate Social Responsibility (CSR), serta forum diskusi antar stakeholder. Faktor pendukung kolaborasi meliputi kesadaran bersama terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, dukungan pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal. Namun, kolaborasi belum berjalan optimal karena belum terbentuknya kelembagaan pengelola yang resmi, lemahnya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder, serta ketidakjelasan pembagian peran. Dengan demikian, kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok berada pada tahap berkembang

(evolving), sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kata kunci : Kolaborasi Stakeholder, Pentahelix, Pengembangan Wisata Kampung Blekok

Abstract. Kampung Blekok Tourism in Situbondo Regency is a conservation-based tourist destination that holds great potential for development, focusing primarily on environmental preservation and the mangrove ecosystem. However, the development of this area currently faces various significant challenges, such as a continuous decline in tourist visits, a lack of active coordination among stakeholders, an unoptimized management institutional framework, and limited participation from various crucial parties. This study specifically aims to analyze the stakeholder collaboration process in the development of Kampung Blekok Tourism in Situbondo Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, collecting comprehensive data through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants were carefully selected using a purposive sampling technique, encompassing key elements of the government, private sector, academics, local community, and the media. Data analysis utilized an interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study demonstrate that stakeholder collaboration involves five essential elements within the pentahelix model: government, private sector, academics, community, and media. This collaboration is manifested through environmental conservation activities, tourism promotion, community empowerment, Corporate Social Responsibility programs, and active stakeholder discussion forums. Supporting factors include a shared awareness of environmental preservation, local government support, and regional economic benefits. However, the collaboration has not run optimally due to the absence of a formal management institution, weak communication among stakeholders, and an unclear division of roles. Consequently, stakeholder collaboration remains at an evolving stage, necessitating institutional strengthening, enhanced coordination, and shared commitment to realize sustainable tourism development.

Keywords: Stakeholder Collaboration, Pentahelix, Development of Kampung Blekok Tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. UNWTO (2019) menegaskan bahwa pariwisata berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi Schubert et al. (2011) menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Pariwisata berkontribusi terhadap pembangunan karena dapat mempromosikan daerah yang kurang berkembang (Dahribal Ashar, 2024). Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya yang ada, melainkan juga pada sistem tata kelola dan pendekatan strategis yang diterapkan. Tanpa rencana dan pengelolaan yang memadai, industri pariwisata berisiko menciptakan kesenjangan sosial serta kerusakan lingkungan di destinasi wisata.

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang semakin relevan dalam pengembangan industri pariwisata di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan menjadi strategi penting untuk memastikan manfaat jangka panjang (Novi Irawati, Hendi Prasetyo 2025). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan penguatan sosial budaya lokal (Dodds & Butler, 2019; Irawati & Prasetyo, 2025). Oleh karena itu, tata kelola pariwisata menurut kolaborasi lintas aktor melalui pendekatan governance kolaboratif. Pariwisata merupakan sektor yang lingkupnya sangat luas karena meliputi berbagai aktivitas seperti perjalanan, rekreasi, pembelajaran, kebudayaan, serta wisata yang berbasis pada alam. Saat ini, salah

satu bentuk pengembangan pariwisata yang semakin dikembangkan adalah ekowisata. Ekowisata tidak berfokus hanya pada upaya menarik kunjungan wisatawan, melainkan juga mengutamakan pelestarian lingkungan, memberikan edukasi, serta memberdayakan masyarakat sekitar. Ekowisata dipandang sebagai salah satu bagian dari pariwisata yang memanfaatkan potensi alam secara optimal tanpa mengabaikan upaya menjaga kelestarian ekosistem yang ada. Salah satu destinasi wisata yang memiliki karakteristik adalah Wisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo. Pengelolaan ini didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang konservasi keanekaragaman hayati menempatkan kawasan Kampung Blekok sebagai wilayah yang memiliki fungsi pelestarian lingkungan, perlindungan habitat burung blekok, serta ekosistem mangrove. penelitian ini merujuk pada status kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang secara formal diatur dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 dan SK POKDARWIS Nomor 188/35/431.510.9.4/2017 sebagai destinasi wisata. Pengelolaan Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Lingkungan (DLH), Pemerintah Desa Klatakan, Pemerintah Kecamatan Kendit, serta masyarakat sekitar kawasan pesisir. Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan Wisata Kampung Blekok masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian ini, Kampung Blekok mengalami penurunan aktivitas wisata pasca-pandemi. Kedatangan pengunjung tergantung dengan situasi dan kondisi di Kampung Blekok. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung Desa Wisata Kampung Blekok sekitar 63.602 pengunjung, namun pada 2020 lantaran jumlah pengunjung menurun drastis, yakni berjumlah 23.409 orang. Pada tahun 2021 saat covid masih parah, pengunjung kembali turun menjadi 11.571 orang. Tapi pada tahun 2022

jumlah pengunjung naik menjadi 14.520 orang. (<https://kolomdesa.com/kampung-blekokhabitat-burung-endemik-langka-9287/>).

Pengembangan

pariwisata yang berfokus pada konservasi membutuhkan kerjasama yang efisien antar para pemangku kepentingan agar pengelolaan lokasi wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan. Namun, adanya kerjasama yang kurang kuat, pembagian tanggung jawab yang belum ideal, dan rendahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan masih menjadi masalah dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ramadhan dan rekan-rekan (2022), mengungkapkan bahwa ego sektoral dan lemahnya koordinasi menjadi penghalang utama dalam pengembangan desa wisata, tetapi belum membahas mengenai proses kerjasama di destinasi yang mengalami stagnasi setelah pandemi. Oleh karena itu, studi ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis proses kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui Collaborative Team Process dalam model Pentahelix. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok di Kabupaten Situbondo. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kolaborasi stakeholder serta model pentahelix dalam pembangunan destinasi wisata berbasis komunitas, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam memperkuat sinergi, revitalisasi pengelolaan, serta mewujudkan pengembangan Wisata Kampung Blekok yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena mampu mengeksplorasi realitas nyata yang berkaitan dengan interaksi

kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor lainnya dalam proses pengembangan pariwisata di Kampung Blekok. Lokasi penelitian adalah area Wisata kampung Blekok yang berada di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Penelitian dilaksanakan selama dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026.

Teknik pemilihan informan dilaksanakan secara purposive sampling, dimana informan ditentukan oleh peneliti sebelum penelitian dilaksanakan. Penulis akan mewawancarai informan utama dari pihak pemerintah yang meliputi Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH), Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Camat Kendit, Kepala Desa Klatakan serta POMI. Sebagai informan tambahan dan pendukung, penulis juga mewawancarai POKDARWIS, BUMDes, Akademisi, Media serta Masyarakat di sekitar Wisata Kampung Blekok. Data Sekunder diperoleh dari dokumen, catatan. Laporan, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

Teknik analisis data pada penelitian ini berpedoman pada analisis data kualitatif yang dilaksanakan Miles Huberman dan Saldanan (2014:14) yang dikutip oleh Sugiono (2019:322) yaitu Data Collection atau pengumpulan data, Data Condensation atau pengabungan data, Data Display atau penyajian data dan Conclussing Drawing/Verifcation atau kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wisata Kampung Blekok Kampung Blekok merupakan kawasan konservasi mangrove dan burung air di Kabupaten Situbondo. Kawasan ini merupakan kawasan unik yang dihuni oleh ribuan burung air berkoloni di area mangrove Kampung Blekok. Kawasan Wisata Kampung Blekok berada di Dusun Pesisir Timur yang merupakan salah satu wilayah administrative yang berada di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Wisata Kampung

Blekok dikembangkan melalui konsep ekowisata berbasis community-based tourism dikarenakan area konservasi mangrove seluas kurang lebih enam hektare ini merupakan tempat hidup dari burung blekok dengan beragam spesies. Desa tempat wisata ini juga merupakan sentra kerajinan tangan berbahan dasar kayu, Melihat potensi wisata ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sebagai salah satu tujuan wisata di Kabupaten Situbondo. Pengelolaan wisata ini dinaungi oleh kelompok sadar wisata (POKDARWIS).

Identifikasi dan Peran Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok Wisata Kampung Blekok menunjukkan keterlibatan multi-stakeholder yang mencerminkan pola kolaborasi lintas sektor yang dilibatkan mencakup pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, akademisi, serta media. Keberagaman aktor ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan bersifat kolaborasi dan lintas sektor. Dinas Lingkungan hidup (DLH) merupakan stakeholder utama yang memiliki kewenangan atas kawasan, baik dari segi administratif maupun pengelolaan aset kolaborasi ini telah berlangsung dan menampakkan sinergi antarpihak, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Tabel 1. Identifikasi dan Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok

No	Nama Stakeholder	Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok
1	Ranti Seta Ayu Pratiwi, S.T. (Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup/PPKLH)	Pendampingan proses perencanaan hingga pembangunan fisik kawasan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha dan komunitas yang beroperasi di kawasan.
2	Zukarnain Amrullah, S.P. (Camat Kendit)	Sebagai pendorong dan pembina inovasi, koordinator kolaborasi. Meskipun inovator utama berada di tingkat desa, kecamatan

		berfungsi sebagai pembina dan fasilitator.
3	Narwiyoto, S.H. (Kepala Desa Klatakan)	Penyusunan kebijakan dan regulasi desa wisata sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
4	Andri Wibisono, S.H., M.Si. (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga)	Membina pariwisata pada bidang usaha yang meliputi daya tarik wisata, jasa transportasi, jasa makanan dan minuman, akomodasi, hotel, restoran, kolam renang, MICE (rapat dan event), budaya, serta jasa konsultasi wisata.
5	Muhammad Lubad (POMI)	Fasilitator dan pendamping dalam penguatan kapasitas kelembagaan serta infrastruktur pendukung wisata. Berperan pula dalam aspek promosi seperti branding, publikasi, media, jejaring kemitraan, serta dukungan penyelenggaraan event untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisata.
6	Ali Murtadha (POKDARWIS)	Membangun komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan wisata, khususnya dalam pengelolaan teknis serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
7	Adi Muhtar, S.Pd., Gr. (BUMDes)	Mendukung penguatan potensi ekonomi turunan dari sektor pariwisata, seperti pengembangan UMKM, penyediaan produk lokal, dan unit usaha desa. BUMDes tidak terlibat langsung dalam pengelolaan wisata karena telah menjadi kewenangan POKDARWIS.
8	Dr. Yuni Kartika Dewi, S.Pd., M.Si. (Akademisi)	Mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi

		solusi berbasis ilmiah.
9	Setiawan Pangestu (Media Ark Of Mangrove)	Memanfaatkan berbagai media untuk menjangkau audiens seluas mungkin serta menjadi wadah dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai wisata Kampung Blekok.
10	Totok (Masyarakat)	Mengembangkan inisiatif ekonomi seperti pendirian usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan, serta membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan.

Kolaborasi stakeholder di Wisata Kampung Blekok telah terwujud, tetapi masih terkendala oleh ketidakseimbangan peran, koordinasi lemah, dan partisipasi yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sinergi, kejelasan tugas, serta komunikasi yang lebih baik antarpihak untuk menjadikan pengembangan wisata lebih efektif dan berkelanjutan.

Bentuk Kolaborasi antar Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat lokal, dan sektor swasta, yang masing-masing berkontribusi sesuai kemampuan dan wewenangnya. Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kerjasama, termasuk penyusunan program, pengelolaan harian, penyediaan infrastruktur, serta promosi destinasi. Melalui kolaborasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan, pengembangan Wisata Kampung Blekok diharapkan berjalan lebih efektif, sekaligus memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi komunitas setempat.

Tabel 2. Bentuk Kolaborasi antar Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok

No	Nama Stakeholder	Bentuk Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok
1	Ranti Seta Ayu Pratiwi, S.T (Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup/PPKLH)	Koordinasi pembentukan lembaga pengelola baru, penyusunan konsep wisata edukasi dan pengaturan pengelolaan kawasan
2	Zukarnain Amrullah, S.P (Camat Kendit)	Kerja sama antar pemerintah masih belum berjalan secara maksimal akibat kurangnya koordinasi dan kerja sama yang terstruktur
3	Narwiyoto, S.H (Kepala Desa Klatakan)	Koordinasi pengelolaan pariwisata, pemberdayaan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa
4	Andri Wibisono, S.H., M.Si (Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga)	Dukungan untuk tempat pengembangan tempat wisata, penguatan kampanye promosi sektor pariwisata, dan pengoptimalan kerja sama stakeholder
5	Muhammad Lubad (POMI)	Sinergi dalam koordinasi dan perencanaan program secara kolektif antar pemangku kepentingan
6	Ali Murtadha (POKDARWIS)	Pengelolaan kegiatan operasional sektor pariwisata, menjalin koordinasi dengan DLH dan pemerintah desa, serta menjalankan program-program pariwisata
7	Adi Muhtar, S.Pd, Gr (BUMDes)	Penataan dan pengembangan unit usaha pariwisata dengan koordinasi perencanaan di tingkat desa
8	Dr. Yuni Kartika Dewi, S.Pd., M.Si (Akademisi)	Keterlibatan instansi pemerintah mulai dari desa, kecamatan, hingga DISPAR kemudian meluas ke media

		dan akademisi, namun terkendala oleh minimnya koordinasi dan komunikasi
9	Setiawan Pangestu (Media Ark Of Mangrove)	Sinergi promosi dan publikasi destinasi wisata melalui platform digital bersama stakeholder terkait
10	Totok (Masyarakat)	Kolaborasi antara POKDARWIS dan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata belum didukung partisipasi masyarakat yang optimal

Hasil penelitian dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok ini melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, POKDARWIS, BUMDes, sektor swasta, media, akademisi, dan masyarakat. Bentuk kerjasama ke depan, penguatan kolaborasi ini ditunjukkan melalui pembentukan lembaga pengelola baru dan konsep wisata minat khusus yang terintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Permasalahan dan Dampak Kolaborasi terhadap Pengembangan Wisata Kampung Blekok Dalam aspek pengelolaan kegiatan wisata, terdapat pola kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Desa Klatakan, dan POKDARWIS Kampung Blekok yang berlangsung selama periode 2017 hingga 2022. Kontribusi aktif pemerintah desa baru dimulai sejak pembukaan wisata pada tahun 2019. Proses pengembangan Wisata Kampung Blekok, para pemangku kepentingan masih dihadapkan pada berbagai masalah. Situasi tersebut tidak langsung mempengaruhi dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata yang dimiliki. Kolaborasi antar stakeholder menjadi faktor yang amat krusial, sebab tidak hanya membantu mengatasi berbagai kendala tersebut, tetapi juga menghasilkan dampak terhadap peningkatan keberlanjutan pengembangan Wisata Kampung Blekok. Pengembangan Wisata Kampung Blekok belum optimal karena

sejumlah kendala, seperti pemindahan anggaran akibat pandemi, koordinasi antarpihak yang lemah, serta ketiadaan revitalisasi kawasan secara komprehensif. Tambahan lagi, masalah teknis seperti aksesibilitas buruk dan pengelolaan yang tidak efektif menyebabkan penurunan pengunjung. Pandemi COVID-19 menghentikan perpanjangan kerjasama formal sejak Februari 2022 dan mencegah pembentukan lembaga pengelola resmi, sehingga pengelolaan kurang terstruktur, memicu penurunan wisatawan, pendapatan masyarakat, serta perbaikan infrastruktur pasca-banjir yang merusak akses dan kenyamanan pengunjung. Kolaborasi antar pemerintah daerah, desa, kecamatan, dan BUMDes pun belum optimal karena absennya strategi pengelolaan kolektif. Namun, dampak positif muncul dari peran media yang sukses mempromosikan wisata minat khusus, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan usaha lokal dan kebanggaan atas status destinasi wisata, meski tidak merata di kalangan warga

Tabel 3. Permasalahan dan Dampak Kolaborasi Terhadap Pengembangan Wisata Kampung Blekok

No	Permasalahan	Dampak
1	Refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan program pengembangan wisata tidak berjalan	Akibat pandemi Covid-19, perjanjian kerja sama antar pemangku kepentingan tidak diperpanjang sejak Februari 2022, serta lembaga pengelola wisata resmi belum terbentuk
2	Infrastruktur yang mengalami kerusakan seiring dengan kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait	Pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata mengalami penurunan seiring dengan penurunan jumlah wisatawan yang datang
3	Pengelolaan wisata dan aksesibilitas kawasan masih belum optimal, dengan jalur yang cenderung memanjang dan tidak membentuk	Jembatan kayu utama Kampung Blekok rusak akibat banjir Februari 2025, belum diperbaiki hingga kini, berisiko menghambat

	sirkulasi	aksesibilitas dan pengembangan wisata berkelanjutan
4	Perbedaan persepsi sosial dan konflik dalam masyarakat terkait pengembangan sektor pariwisata	Kolaborasi stakeholder di Kampung Blekok berdampak positif pada lingkungan dan ekonomi masyarakat, namun belum optimal karena belum ada strategi kolektif antara DLH, Pemerintah desa, kecamatan, dan BUMDes. Akibatnya, pengembangan wisata belum terintegrasi
5	BUMDes mengalami keterbatasan dalam beroperasi di sektor wisata karena tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan, serta terdapat regulasi yang membatasi pengembangan usaha guna menghindari tumpang tindih dengan pengelola lainnya	Media yang berfungsi sebagai penghubung informasi antara penyedia jasa dan wisatawan, berdampak positif dengan meningkatnya minat wisatawan terhadap Kampung Blekok
6	Kapasitas SDM, alokasi peran masyarakat, serta pemeliharaan fasilitas wisata masih belum berjalan dengan optimal	Kampung Blekok berdampak positif secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, pendapatan pelaku usaha lokal meningkat. Secara sosial, masyarakat bangga dengan daerahnya sebagai destinasi wisata di Kabupaten Situbondo
7	Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan setelah pandemi hingga awal tahun 2024, yang menyebabkan berkurangnya aktivitas sektor wisata	

Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok Faktor pendukung merupakan faktor yang dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap proses suatu program. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam memperkuat hubungan dan koordinasi antara pemerintah, pengelola wisata, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya

sehingga kegiatan pengembangan wisata dapat berjalan lebih efektif. Sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang menjadi kendala setiap kegiatan dan bisa berdampak negatif. Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Kampung Blekok didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertama, kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi wisata. Seluruh pihak memahami bahwa hutan mangrove dan burung blekok merupakan daya tarik utama yang harus dijaga bersama. Kesadaran ini mendorong pemerintah, masyarakat, POKDARWIS, dan pelaku UMKM untuk berkolaborasi dalam upaya konservasi. Kedua, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) menjadi sarana penting dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antar stakeholder. Ketiga, dukungan pemerintah daerah melalui RPJMD, CSR, komunitas penggiat wisata, dan partisipasi masyarakat. Keempat, kehadiran Wisata Kampung Blekok memberikan dampak ekonomi positif berupa terbukanya peluang usaha dan perkembangan sektor UMKM seperti kerajinan kerang dan kayu. Masalah utama dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok adalah ketiadaan lembaga pengelolaan resmi yang menyebabkan pengelolaan berada dalam kondisi vakum dan koordinasi antar stakeholder menjadi lemah. Belum adanya revitalisasi kawasan juga membuat pengembangan wisata mengalami stagnasi. Selain itu, masih adanya pola pikir parsial di kalangan masyarakat yang cenderung mengelola secara mandiri tanpa kelembagaan formal. Perbedaan pandangan terkait aksesibilitas wisata dan belum jelas pembagian peran antara BUMDes dan POKDARWIS juga menjadi penghambat.

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Kampung Blekok

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Stakeholder menyadari keterkaitan antara kelestarian lingkungan dan manfaat	Belum terbentuknya lembaga pengelola wisata yang resmi menjadikan operasional

	ekonomi sektor pariwisata	pengelolaan Wisata Kampung Blekok belum terstruktur dan berjalan dengan baik
2	Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan sebagai forum komunikasi, koordinasi, dan pemecahan masalah bersama antar stakeholder	Tidak ada aktivitas pariwisata yang berjalan di Kampung Blekok, belum adanya pembaruan atau revitalisasi kawasan wisata, dan minimnya kegiatan yang bisa dikoordinasikan antara para pemangku kepentingan
3	Dalam RPJMD Kabupaten Situbondo, terdapat dukungan visi dan misi Bupati yang meliputi program CSR untuk membina UMKM dan membangun daerah, serta gotong royong komunitas media wisata dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata	Pola pikir parsial yang dimiliki masyarakat serta kebiasaan mengelola secara mandiri tanpa adanya struktur kelembagaan formal
4	Masyarakat merasakan manfaat ekonomi berupa peluang usaha yang terbuka meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan wisata	Perbedaan pendapat dalam hal akses dan penataan kawasan wisata, khususnya terkait jalur masuk yang mengarah ke lokasi objek wisata
5	Terdapat visi bersama untuk melestarikan lingkungan sekaligus mengembangkan usaha kerajinan lokal yang terbuat dari kerang dan kayu di kawasan Wisata Kampung Blekok	Belum adanya kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab antara BUMDes dan POKDARWIS, serta koordinasi yang baru terbentuk secara situasional
6		Minimnya kegiatan pertemuan yang terstruktur antara stakeholder, menyebabkan koordinasi dan persamaan persepsi dalam menentukan prioritas pengelolaan wisata belum optimal

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok melibatkan lintas sektor melalui model pentahelix yang mencakup pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media. Hal ini direalisasikan dalam beberapa kegiatan konservasi lingkungan, promosi destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, program CSR dari sektor swasta, serta forum diskusi antar stakeholder untuk membangun pengembangan wisata. Namun terdapat kendala seperti belum berjalan secara optimal dengan terhambatnya ketiadaan lembaga pengelola yang tetap dan terstruktur, koordinasi serta komunikasi antar stakeholder yang masih lemah, dan pembagian peran yang belum jelas. Faktor pendukung yang menjadi kekuatan adalah dukungan masyarakat lokal, keterlibatan pemerintah daerah dalam sosialisasi dan pengembangan, serta rutinnnya pelaksanaan forum diskusi. Berdasarkan kondisi tersebut, proses kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Wisata Kampung Blekok saat ini berada di tahap berkembang, dimana kerjasama antar stakeholder telah terbentuk namun belum terintegrasi secara menyeluruh dan maksimal. Merujuk dari hal tersebut disarankan untuk: (1)pemerintah dan seluruh stakeholder memperkuat kelembagaan pengelola wisata, (2)meningkatkan koordinasi dan komunikasi melalui forum kolaborasi yang berkelanjutan, (3) memaksimalkan pengembangan potensi wisata melalui peningkatan infrastruktur, promosi, dan pemberdayaan masyarakat, tujuannya untuk meningkatkan daya tarik wisata dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Studi di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang).
 Administrasi Publik.
 approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.
- Ashar, D. (2024). Kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan wisata Karst RammangRammang
- Bungin, B. (2015). Metodologi penelitian kualitatif. Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods
 Daerah, 12(1), 15-27.
- Dahribal Ashar. (2024). Pariwisata dan pembangunan wilayah. Jurnal Pembangunan
 dalam pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Pantai Karang Jahe
 dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas. JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi
 Desa Punjulharjo Rembang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu
- Dodds, R., & Butler, r. (2019). Overtourism: Issues, realities and solutions.
 Berlin: De
- Dongko Kabupaten Trenggalek. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 15(1), Juni.
- Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2021). Kolaborasi antar stakeholder
 Economis, 17(5), 971-998.
- Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.
- Fatin, A. d., Devina, F., & Musleh, M. (2024). Kolaborasi stakeholder dalam
- Fikri, A. (2019/2020). Kolaborasi pemerintahan daerah kabupaten kombok barat dengan
 Giri Menang). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
 Gruyter.

Hulu Sungai Selatan. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 7(2),202-216.

Internasional Press.

Irawati, N., & Prasetyo, H. (2025). Pariwisata berkelanjutan: konsep, penerapan, dan

Irawati, N., & Prasetyo, H. (2025). Pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Jurnal

Ismayanti. (2010). Pengantar pariwisata. Jakarta: PT Grasindo

ISSN 2087-8923; e-ISSN 2549-9319.

Kabupaten Malang. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. kampung budaya dengan persektif pentahelix (Studi pada Kampung Cempluk di Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek. Fakuktas Ilmu Administrasi, Mataram.

menuju warisan Geopark UNESCO di Kabupaten Maros. Fakultas Ilmu

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2014). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.

Negara, 19(1),70-80.

Nikma, A. A. (2020). Kolaborasi stakeholder pada program Gerakan Tengok Sawah Masalah

Pariwisata Indonesia, 10(1), 55-68.

pemerintah kota mataram dalam pengelolaan sumber daya air (Studi kasus di PDAM

Penerbit Buku Ajar (E-Book/ResearchGate).

pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Pandean Kecamatan

pengembangan pariwisata pada Desa Wisata kandri Kota Semarang. Jurnal

Rahmawati, E., Setyowati, D.I., & Nugraha, S. B. (2021). Ekowisata dan jasa lingkungan.

Ramdhan, C., Subowo, a., & Maesaroh. (2022). Kolaborasi antar stakeholder dalam

- Sari, E. P. (2021). Kolaborasi stakeholder dalam mendorong terwujudnya pengembangan
- Schubert, S. F., Brida, J. G., & Risso, W. A. (2011). The impacts of tourism. Tourism
 Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
- Septiani, N. J., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2020). Proses kolaborasi stakeholder
- Solahuddin. (2021). Kolaborasi penta helix dalam pengembangan pariwisata. Jember:
 Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dipenegoro.
 Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- stakeholder dalam reforma agrarian dengan pola redistribusi tanah di kabupaten
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2016). Metode penelitian pendidikan. PT Remaja Rosdakarya.
- Suwantoro, G. (2004). Dasar-dasar pariwisata. Yogyakarta: Andi.
- tantangan. Widina Media Utama.
- Triandru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. F. (2021). Kolaborasi Universitas Brawijaya, Malang.
- UNWTO.
- Winata, Edi. (2024). Pengantar pariwisata. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Wirawan, P. E., & Semara, I. M. T. (2021). Pengantar pariwisata. Denpasar: IPB
- Word Tourism Oragnization. (2019). International tourism highlights. Madrid:
- Zhafira, W. (2021). Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Industri kerajinan manikmanik

**SOSIALISASI TUGAS DAN WEWENANG POLRI, DALAM
PEMELIHARAAN KAMTIBNAS DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM
BINGKAI REFORMASI POLRI**

***DISSEMINATION ON THE DUTIES AND AUTHORITY OF THE
INDONESIAN NATIONAL POLICE (POLRI) REGARDING THE
MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER AND SECURITY AND LAW
ENFORCEMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF POLICE REFORM***

Hasan Muchtar Fauzi¹, Ilmiyah²

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Abdurachman Saleh

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Abdurachman Saleh

Abstrak. merupakan salah satu institusi negara yang terdepan menjaga masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi tugas dan wewenang Polri, dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum dalam bingkai reformasi Polri bersama akademisi memberikan edukasi hukum secara objektif, mengkaji efektivitas struktural kepolisian, dan mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan serta mitra strategis dalam pelaksanaan tugas Polri.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang POLRI, Keamanan, Penegak Hukum

Abstract. The Indonesian National Police (Polri) carries out policing duties across the entire territory of Indonesia. The police force stands as a primary state institution dedicated to safeguarding the public. The entire community desires the realization of a secure and orderly environment—fostering a sense of peace and tranquility, boosting work motivation and morale by eliminating the fear of potential disturbances. Polri faces significant responsibilities regarding the prevention of violations and crimes, the provision of public services, and the protection and maintenance of public order. Community engagement initiatives—

conducted in collaboration with academics—focus on raising awareness about Polri's duties and authority in maintaining public order and enforcing the law within the framework of police reform. These initiatives provide objective legal education, evaluate the structural effectiveness of the police force, and encourage students to become agents of change and strategic partners in the execution of Polri's duties.

Keywords: Polri Duties and Authority, Security, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (agent of change), pengawas sosial (social control), dan calon pemimpin bangsa. Di tengah perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks, mahasiswa dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penyalahgunaan media sosial, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana siber, radikalisme, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. Kondisi tersebut memerlukan upaya edukasi yang berkesinambungan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum, keamanan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kalangan akademisi menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum serta memperkuat budaya tertib, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan perguruan tinggi. Polri memiliki peran dalam memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi kepolisian, perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Sementara itu, akademisi berperan memberikan perspektif ilmiah, kritis, dan edukatif sehingga mahasiswa mampu memahami berbagai isu hukum dan keamanan secara objektif dan komprehensif. Melalui kegiatan sosialisasi ini

diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara Polri, akademisi, dan mahasiswa. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi hukum, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus dan masyarakat yang aman, damai, serta kondusif. Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis Polri dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa melalui sikap kritis, bertanggung jawab, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan akademisi (dosen) sebagai narasumber kepada mahasiswa. Kegiatan dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 1. Tahap Persiapan Tahap persiapan diawali dengan identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan yang dihadapi mahasiswa terkait pemahaman mengenai peran Polri, kesadaran hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan kampus. Selanjutnya dilakukan koordinasi antara tim pengabdian dari perguruan tinggi dengan pihak Polri untuk menyusun konsep kegiatan, menentukan materi sosialisasi, menetapkan narasumber, serta menyusun jadwal pelaksanaan. Pada tahap ini juga disiapkan berbagai kebutuhan teknis, seperti

penyusunan materi presentasi, modul atau leaflet, instrumen pre-test dan post-test, daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sosialisasi. 2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan kegiatan oleh perwakilan perguruan tinggi yaitu Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi secara bergantian oleh narasumber dari Polri dan akademisi. Narasumber dari Polri memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Polri, kesadaran hukum, pencegahan tindak pidana, keamanan digital, serta peran generasi muda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, akademisi menyampaikan materi berdasarkan kajian ilmiah yang memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai aspek hukum, sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Metode penyampaian dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, serta pemberian contoh-contoh permasalahan yang sering dihadapi mahasiswa. Pendekatan partisipatif diterapkan agar peserta dapat menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan sehingga tercipta proses pembelajaran dua arah yang efektif. 3. Tahap Evaluasi Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi dilaksanakan melalui pemberian pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta. Selain itu, dilakukan penyebaran angket kepuasan peserta guna memperoleh masukan mengenai kualitas materi, metode penyampaian, kompetensi narasumber, serta manfaat kegiatan. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengabdian. Temuan dari proses evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan pengembangan kegiatan sosialisasi pada masa mendatang sehingga program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang

lebih optimal bagi peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan partisipasi mahasiswa dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama akademisi kepada mahasiswa merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara institusi penegak hukum dan perguruan tinggi dalam membangun kesadaran hukum, meningkatkan literasi keamanan, serta memperkuat karakter generasi muda. Kegiatan ini menjadi media edukasi yang memberikan pemahaman mengenai berbagai isu strategis, seperti ketertiban masyarakat, pencegahan tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, kejahatan siber, radikalisme, serta etika bermedia sosial. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, sosialisasi merupakan proses individu mempelajari nilai, norma, serta pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat sehingga mampu menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks sosialisasi Polri kepada mahasiswa, proses ini bertujuan menanamkan pemahaman mengenai kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan akademik dan masyarakat yang aman, tertib, serta berlandaskan nilai-nilai hukum. Oleh karena itu, sinergi antara Polri dan akademisi tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dialog yang kritis, ilmiah, dan konstruktif. Kehadiran akademisi dalam kegiatan sosialisasi memberikan perspektif teoritis dan berbasis penelitian, sedangkan Polri memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan,

tantangan di lapangan, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta kemampuan mahasiswa dalam menyaring informasi di era digital. Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antara kepolisian, perguruan tinggi, dan masyarakat sebagai mitra dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Kesadaran hukum mencakup empat indikator, yaitu:

- Pengetahuan hukum,
- Pemahaman hukum,
- Sikap terhadap hukum,
- Pola perilaku hukum.

Melalui sosialisasi, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa collaborative governance adalah proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersama-sama. Dalam kegiatan ini, Polri dan perguruan tinggi berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas edukasi hukum kepada mahasiswa sehingga tercipta sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan teori-teori tersebut, sosialisasi Polri bersama akademisi kepada mahasiswa merupakan bentuk pendidikan sosial yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, membangun kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat. Sinergi antara pendekatan praktis dari Polri dan pendekatan ilmiah dari akademisi menjadikan kegiatan sosialisasi lebih efektif dalam membentuk karakter mahasiswa yang taat hukum, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan Polri dan akademisi kepada mahasiswa berlangsung dengan baik serta mendapat respons yang positif dari peserta. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi yang menunjukkan antusiasme tinggi selama penyampaian materi maupun sesi diskusi. Materi yang disampaikan mencakup peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pentingnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda, pencegahan tindak pidana di lingkungan kampus, serta kontribusi akademisi dalam membangun budaya berpikir kritis dan berintegritas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai fungsi dan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Mahasiswa juga memperoleh wawasan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum, etika dalam penggunaan media sosial, serta upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti penyebaran hoaks, penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan kejahatan siber. Selain itu, penyampaian materi oleh akademisi memberikan perspektif ilmiah mengenai hubungan antara hukum, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat sehingga mahasiswa mampu memahami permasalahan secara lebih komprehensif.



UNARS
UNIVERSITAS
Abdurachman Saleh Situbondo



UNARS BERSINERGI DENGAN POLRI DALAM SOSIALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN KAMTIBMAS



Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa melalui kegiatan Sosialisasi Tugas dan Wewenang Polri dalam Pemeliharaan Kamtibmas dan Penegakan Hukum dalam Bingkai Reformasi Polri. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 19 Mei 2026, bertempat di Aula Kampus I UNARS.

Acara diawali dengan sambutan dari Rektor UNARS, Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H., yang menegaskan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan institusi kepolisian.

"Kampus memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang sadar hukum. Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dapat memahami peran Polri secara lebih utuh dan objektif," ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber, yaitu AKBP Martin Lac Makalew, S.E., M.H., CPM., CPArb., CPA dari Polda Jawa Timur, Dr. Hasan Mochtar Fauzi, S.Sos., M.Si. selaku Dekan FISIP UNARS, serta Dr. Supriyono, S.H., M.Hum. selaku dosen Fakultas Hukum UNARS.

Dalam pemaparannya, AKBP Martin Lac Makalew menekankan bahwa Polri terus bertransformasi menuju institusi yang profesional dan humanis.

"Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Reformasi Polri menuntut kami untuk semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Dr. Hasan Mochtar Fauzi menyoroti pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam menjaga kamtibmas.

"Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi serta mampu menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial," ungkapnya.




Senada dengan hal tersebut, Dr. Supriyono menambahkan bahwa pemahaman hukum perlu dibangun sejak dini.

"Penegakan hukum yang baik harus didukung oleh masyarakat yang sadar dan taat hukum. Edukasi seperti ini menjadi langkah penting dalam membangun budaya hukum di lingkungan akademik," tuturnya.

Antusiasme mahasiswa terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung, ditandai dengan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai isu aktual terkait hukum dan keamanan di masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami fungsi Polri secara teoritis, tetapi juga mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan.

unars_situbondo@unars.ac.id
www.unars.ac.id
081232037760 | 081232037761 | 081232037721

PMB UNARS #AyoKuliahDiUnars






unarskita unarsofficial @Unarskita

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Tugas Dan Wewenang Polri

Selama sesi tanya jawab, mahasiswa menunjukkan partisipasi aktif dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait implementasi hukum, mekanisme penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi Polri di era digital. Diskusi yang berlangsung secara interaktif mencerminkan

meningkatnya minat mahasiswa untuk memahami isu-isu hukum dan keamanan dari sudut pandang praktis maupun akademis. Berdasarkan hasil pembahasan, kolaborasi antara Polri dan akademisi terbukti memberikan nilai tambah dalam proses edukasi kepada mahasiswa. Polri menghadirkan pengalaman empiris mengenai praktik penegakan hukum di lapangan, sedangkan akademisi memperkuat materi melalui pendekatan teoritis dan analisis ilmiah. Sinergi tersebut menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif karena peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga memahami penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Kegiatan sosialisasi ini juga berkontribusi dalam membangun hubungan yang lebih baik antara Polri, perguruan tinggi, dan mahasiswa. Melalui komunikasi yang terbuka, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, maupun kritik secara konstruktif sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai peran masing-masing pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi hukum, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat kolaborasi antara Polri, akademisi, dan mahasiswa. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tema-tema yang lebih spesifik sesuai perkembangan tantangan sosial dan teknologi, sehingga mampu menghasilkan generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus maupun masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi yang menghadirkan Polri dan akademisi kepada mahasiswa berlangsung dengan baik serta menjadi wadah yang efektif untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai berbagai isu hukum, keamanan, dan kehidupan bermasyarakat. Melalui penyampaian materi yang dipadukan dengan perspektif akademis dan pengalaman praktis dari Polri, mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi interaktif yang berlangsung selama kegiatan juga menunjukkan tingginya antusiasme mahasiswa dalam menyampaikan pertanyaan, gagasan, dan pandangan kritis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara institusi kepolisian, perguruan tinggi, dan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sadar hukum, memperkuat persatuan, serta menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang berkelanjutan antara Polri, kalangan akademisi, dan mahasiswa dalam mendukung terciptanya masyarakat yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, serta mampu menghadapi dinamika sosial di era modern dengan sikap yang kritis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckman. "The Social Contruction of Reality, (terj), Hasan Basri, Tafsir Sosial Atas kenyataan." Jakarta: LP3ES: 1990.

Persada.

Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soejono. (1982). Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (2002). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: PT.

Soekanto, Soerjono. (2011). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo

SOSIALISASI PENCEGAHAN BULLYING & PERNIKAHAN DINI DI SMPN 3 SITUBONDO

SOCIALIZATION OF BULLYING AND EARLY MARRIAGE PREVENTION AT SMPN 3

Usrotul Hasanah¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abstrak. Akhir-akhir ini banyak pemberitaan tentang bullying antar siswa, bahkan sampai memakan korban sedangkan pencegahan perilaku bullying belum sepenuhnya teratasi dan sesuai harapan. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman dasar mengenai bullying dan pernikahan dini di lingkungan sekolah maupun masyarakat, serta dampak hukum yang diterima bila terjadi kasus bullying di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, metode yang digunakan adalah penyuluhan (sosialisasi).

Kata Kunci: Bullying, Pernikahan Dini, Kekerasan

Abstract. Recently, there has been a lot of news about bullying between students, even to the point of causing casualties, while efforts to prevent bullying have not been fully addressed and met expectations. The purpose of this community service is to provide a basic understanding of bullying and early marriage in schools and the community, as well as the legal consequences of bullying incidents in schools. The method used in this community service activity is outreach (socialization).

Keywords: Bullying, Early Marriage, Junior High School

PENDAHULUAN

Pergaulan anak muda di Indonesia seringkali diliputi kekerasan dan perbuatan-perbuatan tidak terpuji terhadap teman sebaya, hingga mengarah kepada praktek bullying yang mudah ditemukan di lingkungan sekolah. Bagi seorang anak yang sedang berada dalam masa pendidikan, lingkungan sekolah mempunyai pengaruh penting dalam pembentukan kepribadiannya. Artinya kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh kejadian atau peristiwa yang dialaminya saat berada di sekolah. Anak-anak yang mendapatkan tindakan bullying saat menjalani pendidikan di masa sekolah tentu akan merasa tidak nyaman, dan merasa berat

untuk mendatangi sekolahnya, sehingga beberapa dari mereka memilih tidak datang bahkan putus sekolah akibat besarnya rasa takut yang dialami akan bullying tersebut. Beberapa penelitian telah menyoroti faktor-faktor yang berhubungan dengan bullying diantaranya faktor demografi, faktor sosial, faktor gaya hidup dan kondisi hidup dan kerja. Masyarakat Indonesia yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia juga masih menghadapi permasalahan terkait pernikahan dini. Fenomena ini banyak ditemukan di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Pernikahan yang dibangun di atas pondasi yang kuat.

METODE

Adapun metode yang digunakan pada kegiatan Sosialisasi Pengabdian masyarakat di Desa Talkandang ini berupa penyuluhan (sosialisasi) tentang pengenalan bahaya bullying dan pernikahan dini, serta langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak terjadi di lingkungan sekolah. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi dinilai sebagai metode yang ampuh untuk memberitakan informasi yang baru (mengenai bahaya bullying dan pernikahan dini, serta pencegahannya) dalam . Siswa SMPN 3 Situbondo tidak saja melihat apa yang dicontohkan namun juga diajak melakukan praktik pencegahan bullying apabila terjadi di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan bullying dimulai dari lingkungan sekolah karena sebagai tempat belajar sekaligus perkembangan remaja. Perkembangan remaja yang terganggu

dapat berakibat fatal bila tidak ditindaklanjuti sejak dini. Scott menyatakan bahwa fenomena bullying tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu pelaku dan korban, tetapi hal itu lebih menitikberatkan pada aspek sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut terjadi. Kata bully berarti menggertak dan mengganggu orang yang lebih lemah. Istilah bullying kemudian digunakan untuk menunjuk perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang atau sekelompok orang lain yang lebih lemah untuk menyakiti korban secara fisik maupun mental. Bullying bisa berupa kekerasan dalam bentuk fisik (misal: menampar, memukul, menganiaya, mencederai), verbal (misal: mengejek, mengolok-olok, memaki), dan mental/psikis (misal: memalak, mengancam, mengintimidasi, mengucilkan) atau gabungan di antara ketiganya (Olweus, 2013: 24). Penelitian yang dilakukan oleh Skrzypek menghasilkan pemahaman bahwa dampak negatif bullying dirasakan oleh korban, pelaku, korban-pelaku bullying. Penelitian tersebut menggunakan alat ukur Strengths and Difficulties Questionnaire. Maka dalam hal ini sub kelompok tiga mencoba menjadi pembuka jalan bagi siswa di SMPN 3 Situbondo guna mengetahui lebih dalam pengertian bullying secara sederhana maupun lebih kompleks. Selain itu sosialisasi juga berusaha memberikan pengetahuan akan dampak yang ditimbulkan bila terjadi bullying di lingkungan sekolah. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio sebagaimana dalam Yuyarti mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/ kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Sedangkan pernikahan dini merupakan bagian penting dari sosialisasi ini. Pernikahan dini menurut Indraswari (dalam Syafiq Hasyim, 2009: 31) dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini

mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Indraswari mengenai pernikahan dini menekankan pada batas usia pernikahan dini. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal dalam UU perkawinan. Motivasi sosialisasi pencegahan pernikahan dini adalah maraknya pernikahan dini yang terjadi di Desa tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut. Pelaksanaan sosialisasi ini di laksanakan oleh siswa di SMPN 03 Talkandang sebagai peserta Kelas 9. Sosialisasi berupa penyampaian kegiatan program kerja guna menjelaskan mengenai dampak dari perikahan dini. Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap siapapun yang menjalaninya. Dampak perkawinan dini juga terjadi pada suami-isteri adalah tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban, hal ini terjadi karena mental mereka yang masih memiliki sifat keegoisan yang tinggi sehingga menyebabkan pertengkaran, percecokkan, bentrokan antar suami isteri yang dapat mengakibatkan perceraian. Serta dampak bagi masing-masing keluarga, yaitu apabila pernikahan diantara mereka lancar mereka akan ikut senang dan bahagia. Namun apabila pernikahan gagal, maka mereka akan merasa

sedih dan kecewa sehingga dari kegagalan tersebut mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi dengan keluarga. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kesengsaraan bagi yang menjalaninya (Nurkhaerah et al., 2024) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Dengan berbagai cara mereka akan menaikkan umur agar anaknya dapat menikah. Tidak hanya orang tua, dari pihak anakpun demikian. Dari ikatan pernikahan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang beresiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab (Laily Mufid & Hoiru Nail, 2021) Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama. Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan

orang tua (Reskika et al., 2024) Bentuk hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah tersampainya pengetahuan terkait bahaya bullying dan pernikahan dini di lingkungan SMPN 3 Situbondo. Sebagian dari responden dalam kegiatan sosialisasi pencegahan bullying dan pernikahan dini menyatakan bahwa mereka pernah menjadi korban bullying. Di antara bentuk perilaku kerukunan yang diterima seperti diolok-olok diejek diasingkan hingga dipukul. Bullying tidak akan terjadi apabila pelakunya tidak memiliki keinginan untuk membully, serta dorongan yang kuat dalam diri sendiri maupun dari luar. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santrock dalam Danar. Faktor-Faktor Pencapaian Hasil Dari program kerja yang ada, terdapat faktor yang mempengaruhi tercapainya keberhasilan, diantaranya Faktor pendorong :

- Kepala sekolah SMPN 03 Situbondo yang memberikan izin pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini.
- Tema yang dipilih masih berkaitan dengan fenomena di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
- Antusiasme siswa kelas IX SMPN 03 Situbondo dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan.



Gambar 1. Sosialisasi dan Presentasi di depan siswa siswi SMPN 3 Situbondo

KESIMPULAN

Sosialisasi yang dilakukan di SMPN 03 Situbondo dengan tema pencegahan praktek bullying di lingkungan sekolah dan Pernikahan dini mampu mengubah pengetahuan siswa akan bahayanya dampak bullying bagi pelaku maupun korban. Selain itu siswa menjadi lebih berani untuk melakukan laporan kepada pihak sekolah baik kepala sekolah ataupun guru BK apabila terjadi praktik bullying di lingkungan sekolah. Praktik pernikahan dini yang banyak terjadi di masyarakat

yang juga memiliki dampak bagi individu anak-anak dapat memberikan efek dari segala aspek baik kesehatan fisik maupun psikis. Sehingga dalam kegiatan sosialisasi ini masyarakat di edukasi untuk mencegah terjadinya praktek Pernikahan dini yang sering disepelekan. Pihak sekolah dan masyarakat turut serta dalam kegiatan sosialisasi dan merasa sangat antusias dengan kegiatan yang dilakukan mahasiswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan terimakasih kepada : 1. Kepala Sekolah SMPN 03 Situbondo yang telah memberikan tempat dan waktu demi terselenggaranya sosialisasi. 2. Siswa-Siswa kelas 09 SMPN 03 Situbondo yang antusias mendengarkan sosialisasi sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, Kusumasari Kartika Hima & Kurniawati. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagiandan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(01).
- Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko. (2011). Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak. *El Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam*. 1(04).
- Rumekti, Martyan Mita & Pinasti, V. Indah Sri. (2016). PERAN PEMERINTAH DAERAH (DESA) DALAM MENANGANI MARAKNYA FENOMENA PERNIKAHAN DINI DIDESA PLOSOKEREP KABUPATEN INDRAMAYU. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Visty, Sessa Agistia. (2021). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini (The Impact of Bullying on Youth Behavior Today). *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*. 2(01).

**PENDAMPINGAN PEMBUATAN RAPERDA TENTANG
PELAKSANAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

***ASSISTANCE IN DRAFTING THE REGIONAL REGULATION ON THE
MAINTENANCE OF TRANQUILITY, PUBLIC ORDER, AND COMMUNITY
PROTECTION***

Giyanto¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: giyanto30041971@gmail.com

Abstrak. Permasalahan yang ada dalam pengabdian ini adalah meliputi: 1) perlunya harmonisasi Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 2) Belum optimalnya penyusunan norma hukum yang mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat, dan 3) diperlukannya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan regulasi berbasis akademik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk: a) memberikan pendampingan penyusunan Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, b) menghasilkan rumusan norma hukum yang implementatif, dan c) meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode partisipatif agar kebijakan yang dikeluarkan nanti menjadi keputusan bersama dan berdasarkan aspirasi semua pihak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Kabupaten Situbondo telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas proses pembentukan produk hukum daerah. Melalui tahapan identifikasi permasalahan, analisis yuridis, penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan, serta forum diskusi bersama DPRD,

Kata Kunci: Raperda, Ketentraman, Ketertiban Umum, Linmas

Abstract. The issues addressed in this community service initiative include: 1) the need to harmonize the Draft Regional Regulation with higher-level legislation; 2) the suboptimal drafting of legal norms to accommodate evolving community needs; and 3) the need to enhance the capacity of local government officials in drafting regulations based on academic analysis. The objectives of this initiative are to: a) provide assistance in drafting the Regional Regulation on Peace, Public Order, and Community Protection; b) formulate implementable legal norms; and

c) build the capacity of local government officials in drafting local legal instruments. A participatory approach was employed to ensure that the resulting policy reflects a collective decision based on the aspirations of all stakeholders. This community service activity—providing assistance in drafting the Situbondo Regency Regional Regulation on Peace, Public Order, and Community Protection (Trantibumlinmas)—has made a tangible contribution to improving the quality of the local legislative drafting process. This was achieved through stages involving problem identification, legal analysis, harmonization with prevailing legislation, and discussion forums with the Regional House of Representatives (DPRD).

Keywords: Draft Regional Regulation, Peace, Public Order, Community Protection (Linmas)

PENDAHULUAN

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki tugas untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif melalui penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Kabupaten Situbondo telah memiliki pengaturan mengenai ketertiban umum, namun perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan hukum menuntut adanya penyesuaian substansi regulasi agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Situbondo juga terus melakukan penguatan fungsi Satpol PP dan Linmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) memerlukan dukungan akademik agar materi muatan yang disusun memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, memiliki kepastian hukum, dapat dilaksanakan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan

penyusunan Raperda yang melibatkan akademisi, pemerintah daerah, Satpol PP, Satlinmas, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini meliputi: 1) Perlunya harmonisasi Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 2) belum optimalnya penyusunan norma hukum yang mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat, dan 3) diperlukannya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan regulasi berbasis akademik. Tujuan dari pendampingan ini adalah sebagai berikut: 1) memberikan pendampingan penyusunan Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, 2) Menghasilkan rumusan norma hukum yang implementatif, dan 3) meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah.

METODE

Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur organisasi perangkat daerah (OPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga hasil yang didapatkan merupakan kebijakan banyak pihak dan merupakan keputusan dan aspirasi bersama. Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan Satpol PP dan Bagian Hukum Kabupaten Situbondo.
2. Identifikasi kebutuhan regulasi.
3. Focus Group Discussion (FGD).
4. Pendampingan penyusunan materi Raperda.
5. Harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.
6. Penyempurnaan draft Raperda.
7. Evaluasi hasil pendampingan.

Mitra • Satpol PP Kabupaten Situbondo. • Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. • DPRD Kabupaten Situbondo. • Satlinmas Kabupaten Situbondo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Situbondo Kegiatan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Situbondo menghasilkan beberapa capaian penting. Pertama, tersusunnya naskah akademik dan draft Raperda yang telah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, pendampingan berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan aktual yang berkembang di Kabupaten Situbondo, antara lain meningkatnya aktivitas pedagang kaki lima yang memanfaatkan fasilitas umum, gangguan ketenteraman masyarakat akibat kegiatan tertentu yang tidak berizin, pengelolaan ruang publik yang belum tertata optimal, serta perlunya penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di tingkat desa dan kelurahan. Berbagai isu tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi muatan Raperda sehingga regulasi yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, kegiatan pendampingan juga menghasilkan harmonisasi substansi antar perangkat daerah, khususnya antara Satpol PP, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, DPRD, BPBD, Dinas Perhubungan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Harmonisasi ini penting agar pelaksanaan kewenangan masing-masing perangkat daerah tidak tumpang tindih dan dapat

dilaksanakan secara terpadu. Selain itu, melalui forum diskusi dan Focus Group Discussion (FGD), diperoleh berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan mengenai pengaturan hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme pembinaan, penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif, serta pemberdayaan anggota Linmas dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. B. Pembahasan Pendampingan penyusunan Raperda menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan norma hukum, tetapi juga oleh tingkat partisipasi para pemangku kepentingan. Keterlibatan DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat menghasilkan materi muatan yang lebih komprehensif serta sesuai dengan karakteristik sosial Kabupaten Situbondo. Dari aspek substansi, Raperda diarahkan untuk memperbarui pengaturan yang telah ada sehingga mampu menjawab perkembangan dinamika sosial. Pemerintah Kabupaten Situbondo sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah mengenai ketenteraman dan ketertiban umum, namun perkembangan kondisi masyarakat, perubahan regulasi nasional, serta kebutuhan penguatan fungsi Linmas mendorong perlunya penyempurnaan pengaturan. Hal ini juga menjadi dasar pembahasan perubahan regulasi oleh DPRD Kabupaten Situbondo melalui kegiatan studi banding dan harmonisasi kebijakan. Pendampingan juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam pembentukan peraturan daerah. Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum menjadi acuan dalam setiap tahapan penyusunan Raperda. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal drafting, tetapi juga memiliki legitimasi sosial karena disusun melalui proses konsultatif. Dalam aspek penegakan hukum, pembahasan Raperda menekankan bahwa pendekatan represif harus menjadi

pilihan terakhir (ultimum remedium). Upaya preventif melalui sosialisasi, edukasi, pembinaan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dinilai lebih efektif dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Pendekatan ini sejalan dengan praktik Satpol PP Kabupaten Situbondo yang lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Dari sisi kelembagaan, pendampingan menghasilkan rekomendasi penguatan peran Linmas sebagai unsur perlindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Linmas tidak hanya diposisikan sebagai pendukung pengamanan kegiatan masyarakat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mitigasi bencana, pengamanan pemilu, penanganan keadaan darurat, dan deteksi dini gangguan ketenteraman masyarakat. Penguatan kapasitas Linmas perlu didukung melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana prasarana, serta pengalokasian anggaran yang memadai. Hasil pendampingan juga memperlihatkan pentingnya sinkronisasi antara Raperda dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Data Pemerintah Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja daerah yang terus diperkuat melalui peningkatan penegakan perda dan pengembangan kapasitas anggota Linmas. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas Raperda, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Raperda yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang efektif bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib



Gambar 1. Koordinasi Lintas Institusi

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Kabupaten Situbondo telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas proses pembentukan produk hukum daerah. Melalui tahapan identifikasi permasalahan, analisis yuridis, penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan, serta forum diskusi bersama DPRD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satpol PP, dan pemangku kepentingan lainnya, berhasil disusun materi muatan Raperda yang lebih sistematis, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Situbondo. Pendampingan juga memperkuat harmonisasi antara aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Raperda. Dari aspek filosofis, Raperda diarahkan untuk mewujudkan rasa aman, tertib, dan tenteram sebagai bagian dari pelayanan

publik. Dari aspek sosiologis, materi muatan Raperda disusun berdasarkan kondisi faktual masyarakat Situbondo serta berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Sementara dari aspek yuridis, penyusunan Raperda telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Selain menghasilkan rancangan regulasi yang lebih berkualitas, kegiatan pendampingan juga meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memperjelas pembagian kewenangan antarperangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, Raperda yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang efektif bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat fungsi Satpol PP dan Linmas, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat.

V. REKOMENDASI Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1) Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama DPRD perlu mempercepat proses pembahasan, harmonisasi, fasilitasi, dan penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah agar dapat segera diimplementasikan sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 2) Satpol PP Kabupaten Situbondo perlu menyusun peraturan pelaksana, standar operasional prosedur (SOP), serta pedoman teknis sebagai acuan implementasi Peraturan Daerah sehingga pelaksanaan penegakan hukum berjalan efektif, proporsional, dan mengedepankan pendekatan preventif serta persuasif. 3) Pemerintah daerah

perlu meningkatkan kapasitas aparaturnya Satpol PP dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai penegakan Peraturan Daerah, mitigasi bencana, pengamanan kegiatan masyarakat, serta penanganan konflik sosial sesuai tugas Linmas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4) Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif melalui berbagai media komunikasi agar masyarakat memahami hak, kewajiban, larangan, dan mekanisme penegakan hukum sehingga tercipta budaya tertib hukum. 5) Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Peraturan Daerah dengan menggunakan indikator kinerja penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga efektivitas regulasi dapat diukur secara objektif. 6) Perguruan tinggi diharapkan terus menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pembentukan produk hukum daerah sehingga kualitas regulasi daerah semakin responsif, partisipatif, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2021). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2019). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

-
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

IMPROVING FAMILY ECONOMIC WELL-BEING THROUGH WOMEN'S EMPOWERMENT

Hari Susanto¹, Ratih Dwi Anggraini²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars

Abstrak. Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program-programnya yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peningkatan dan pemberian program bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya melalui pemberdayaan disertai fasilitas pendukungnya. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan akan mampu memberikan kesadaran kepada setiap individu untuk berperanserta pada peningkatan ekonomi untuk melangsungkan kehidupan masa depannya dalam keseharian. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk menaikkan tingkat perekonomian daerahnya. Harapannya, mampu menaikkan upah minimum kabupaten (UMK), sehingga peran serta pemerintah dan masyarakatnya harus dipacu agar supaya masyarakatnya mampu mendapatkan sumber ekonominya dengan cara bekerja, berwirausaha serta menciptakan usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang nantinya berperan dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan, dan kontribusi PDB, diantaranya mencakup bidang kuliner, fashion. Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelatihan, penyuluhan serta pendidikan lainnya terkait peningkatan ekonomi masyarakat keluarga dengan melibatkan kaum perempuan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mentransformasi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang nantinya menjadi kekuatan masyarakat yang nyata, memperjuangkan nilai dan kepentingan dalam segala aspek kehidupan serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk penguatan individu, juga penguatan kelembagaan sosial. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Cazzanova Training Center beralamat Bujuk Teni Kecamatan Panji pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 10 November 2025.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Ekonomi.

Abstract. The government employs various methods to boost the local economy through programs designed to help meet daily needs. These programs aim to improve the quality of human resources through empowerment and the provision

of supporting facilities. It is hoped that community empowerment will raise awareness among individuals to participate in economic development, thereby securing their future livelihoods. The government and the community are working together to raise the region's economic level. The hope is to raise the district minimum wage (UMK), so the participation of the government and the community must be encouraged so that the community can secure their economic livelihoods through employment, entrepreneurship, and the creation of UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), which will play a role in job creation, equitable development, and GDP contribution, including in the culinary and fashion sectors. To this end, community empowerment is necessary, encompassing training, outreach, and other educational initiatives related to improving household economic conditions, with the active involvement of women. Community empowerment is an effort to transform community economic growth into a tangible source of strength, advocating for values and interests across all aspects of life, and enhancing community self-reliance. Community empowerment aims to strengthen both individuals and social institutions. The community empowerment program will take place at the Cazzanova Training Center, located in Bujuk Teni, Panji District, from October 27 to November 10, 2025.

Keywords: Community Empowerment, Economic Development.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan agenda utama yaitu memberantas kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia bersifat multiaspek. Kemiskinan bersifat multiaspek diketahui dari dua sudut pandang sebagai berikut: pertama, dalam berbentuk kekayaan yang buruk, organisasi sosial politik, pemahaman dan disiplin yang buruk. Sementara kedua latar belakang dan hubungan perbankan dalam bentuk jaringan yang rendah (Arsyad, 2010 dalam Adim, 2024:112). Berbagai macam program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga penguatan ekonomi inklusif, namun kemiskinan tetap menjadi isu struktural yang kompleks. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran merupakan salah satu prioritas program pembangunan nasional. Kemiskinan sebagai masalah

bangsa merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, dimana kemiskinan tidak terbatas pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi kegagalan untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan yang layak. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (Labor Force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Pengangguran (Unemployment) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negaranegara sedang berkembang (Develoved Contries), akan tetapi juga dialami oleh negara-negara yang sudah maju (Developing Countries). (Imanda dkk, 2023:76). Sukirno (2007:472) mendefinisikan pengangguran adalah seseorang yang telah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Dengan kata lain jika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja dan mengakibatkan pengangguran. (Kardiman, at al. 2006:64 dalam Setyaningsih dkk, 2022:361) Dijelaskan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang telah dirumuskan dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional bahwa misi pembangunan nasional yaitu pembangunan bidang sosial ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, dengan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan salahsatunya adalah

dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran karena berfokus pada peningkatan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat untuk keluar dari keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu perlu ada pemberdayaan (masyarakat) melalui pengembangan usaha. Seperti dinyatakan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin (dalam [https://www.wapresri.go.id/atasi-kemiskinan-dengan-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/#:~:text=%E2%80%9CMenghilangkan%20 kemiskinan%20hanya%20dengan%20bantuan%20sosial%20tidak,itu%20perlu%20ada%20pemberdayaan%20\(masyarakat\)%20melalui%20pengembangan](https://www.wapresri.go.id/atasi-kemiskinan-dengan-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/#:~:text=%E2%80%9CMenghilangkan%20 kemiskinan%20hanya%20dengan%20bantuan%20sosial%20tidak,itu%20perlu%20ada%20pemberdayaan%20(masyarakat)%20melalui%20pengembangan)) bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat hambatan utama, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, perbaikan sektor pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Pemberdayaan adalah pemberian kemampuan kepada pihak yang lemah atau dilemahkan secara politis dan struktural. Setidaknya ada tiga kata kuncinya dari kata Empowerment, yaitu: partisipasi, transparansi, dan demokrasi. Menurut Isbandi (2003 dalam Suaib, 2024:52), menyatakan bahwa upaya pemberdayaan pada individu, keluarga maupun kelompok atau masyarakat adalah upaya pengembangan mereka dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Menurut Wasistiono (1998 dalam Suaib, 2024:35) pemberdayaan dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu a). Pemberdayaan pada individu anggota organisasi; b). Pemberdayaan pada tim atau kelompok masyarakat; c. Pemberdayaan pada organisasi; d). Pemberdayaan pada masyarakat secara keseluruhan. Dilihat dari sasaran dan ruang lingkup tadi, dan konteksnya maka lebih terfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat. Namun mengingat kelompok masyarakat terdiri pula dari anggota masyarakat maka dengan

sendirinya dibahas pula pemberdayaan pada individu/anggota masyarakat. Terkait pemberdayaan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa tujuan utama reformasi diarahkan untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Terkait dengan undang-undang ini, maka tugas pemerintah adalah melaksanakan kegiatan yang terkait pada pemberdayaan masyarakat di setiap daerah, sehingga akan menggerakkan peran serta masyarakatnya, serta peningkatan daya saing dengan mengutamakan sumberdaya alam yang dimiliki untuk dikelola, dengan demikian pengangguran dan kemiskinan akan menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,73 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 sebesar 10,72 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 11,03 persen. Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 berkurang sebanyak 0,09 juta orang (dari 11,27 juta orang pada Maret 2025 menjadi 11,18 juta orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 0,40 juta orang (dari 12,58 juta orang pada Maret 2025 menjadi 12,18 juta orang pada September 2025). (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>). Sedangkan jumlah angkatan kerja bertambah dan jumlah pengangguran menurun. Hal ini ditunjukkan bahwa Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 sebanyak 155,27 juta orang, naik 1,262 juta orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,95 persen, naik sebesar 0,36 poin dibanding Agustus 2025.

Penduduk bekerja pada November 2025 sebanyak 147,91 juta orang, naik 1,371 juta orang dari Agustus 2025. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbanyak pada penduduk bekerja adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebanyak 0,381 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 4,74 persen, turun 0,11 persen poin dibanding Agustus 2025. (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2547/november-2025--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-74-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html>). Sesungguhnya terdapat keterpengaruhan tingkat pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Semakin banyak atau tinggi angka pengangguran maka akan semakin banyak atau meningkat angka kemiskinan. Wulansari et al., (2023 dalam Gulo, 2025: 300) menyatakan bahwa permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan dua isu yang tak terpisahkan dan saling memengaruhi. Tingginya tingkat pengangguran secara langsung berkontribusi terhadap penurunan daya beli dan pendapatan masyarakat, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Selanjutnya Sesmita dkk. (2025:1) menyatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan dua persoalan utama yang saling berkaitan dan menjadi tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan bersifat multidimensional, tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta jaringan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi, keberhasilan suatu negara diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tingginya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya layanan kesehatan, minimnya lapangan kerja, serta kondisi geografis yang terisolasi. Hal tersebut dinyatakan pula oleh

Suryawati (2005 dalam Ghinastri, 2024:73) bahwa tingginya tingkat pengangguran dapat berdampak pada masalah kemiskinan. Dari sisi ekonomi, kemiskinan mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga atau individu. Ini melibatkan kurangnya pendapatan atau sumber daya ekonomi yang memadai untuk mencukupi kebutuhan makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Hasil penelitian Arifuddin, dkk (2023:17-18) mengungkapkan bahwa terdapat Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Masyarakat. Selanjutnya Padang & Murtala (2019:9) menyatakan selain kemiskinan, pengangguran juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam sudut pandang makroekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan suatu masalah. Dampak tingginya tingkat pengangguran akan banyaknya sumber daya sia-sia dan pendapatan masyarakat dapat berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan jumlah kapasitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan perkapita, dan menaikkan jumlah permintaan dan penawaran. Secara teoretis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi penurunan kemiskinan (Ishak et al., 2020). Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan di masyarakat, yang berakibat kemiskinan semakin sulit untuk diatasi. Jumlah pengangguran dan kemiskinan pada suatu daerah berpengaruh pada upah yang diterima daerah itu sendiri, dalam hal ini adalah upah minimum kabupaten atau dapat dikatakan bahwa pengangguran dan kemiskinan memiliki korelasi yang erat dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tingginya pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat dan memicu kemiskinan. Sementara itu,

penetapan UMK yang berlebihan justru dapat membatasi penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran (dalam Ghinastri, 2024:76). Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Penjelasan ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kondisi penyerapan tenaga kerja akan menentukan berapa besar UMK suatu daerah. Semakin meningkat jumlah pengangguran dan menurunnya pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada besar kecilnya UMK daerah tersebut. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (gubernur) untuk setiap kabupaten atau kota di suatu provinsi. Penjelasan di atas menyatakan bahwa terjadi perbedaan pada besarnya UMK di tiap-tiap wilayah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Menurut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026. UMK Jawa Timur Tahun 2026 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,09 persen atau setara Rp177.581 dibandingkan UMK Tahun 2025. Dengan demikian, rata-rata UMK Jawa Timur Tahun 2026 berada di angka Rp3.154.365. Kota Surabaya kembali menempati posisi UMK tertinggi di Jawa Timur dengan besaran Rp5.561.066,00 sementara UMK terendah tercatat di Kabupaten Situbondo sebesar

Rp2.580.449,00.(Sumber:https://ekonomi.bisnis.com/read/20251103/12/1925560/daftar-umk-jawa-timur-2026-jika-naik-105-surabaya-tertinggi-situbondo-terendah#goog_rewarded). Upaya pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah melalui berbagai macam pemberdayaan masyarakat (society empowerment), dengan harapan akan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat serta

akan mengurangi jumlah pengangguran. Saat sekarang ini, umumnya pemberdayaan perempuan sering dilakukan, karena kaum perempuan banyak waktu di rumah, sedangkan para laki-laki banyak yang mempunyai kegiatan di luar rumah. Di sisi lain, kebanyakan kaum perempuan lebih banyak mengetahui kebutuhan rumahtangnya. Pemerintah mengeluarkan program-program khususnya untuk perempuan, salah satu tujuannya untuk membantu perempuan di desa atau perkotaan agar menjadi manusia mandiri perekonomiannya. Program yang ditindaklanjuti berupa pelatihan kewirausahaan (UMKM) dan akselerasi ke sumberdaya dengan harapan memulai usaha mereka sendiri untuk mencari nafkah atau penghasilan sehari-hari. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan, menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan agar dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan untuk pengentasan rakyat dari permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi untuk membuat keputusan yang agar menghasilkan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya (Zakiyah, 2010 dalam https://www.researchgate.net/publication/362252947_Model_Pemberdayaan_Pemempuan#pf39). Badan Pusat Statistik RI tahun 2026 tentang Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, menyebutkan bahwa saat ini di Indonesia jumlah perempuan lebih sedikit dari kaum laki-laki, dengan posisi angka 144.864 (50,44%) untuk laki-laki

dan 142.334,3 (49,56%) dari jumlah total sebesar 287.198,4 orang. Sedangkan BPS Situbondo tahun 2026 menyebutkan bahwa Penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2025 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk sebanyak 694,76 ribu jiwa yang terdiri laki-laki sebanyak 339.86 ribu jiwa (48,92%) dan perempuan sebanyak 354.90 ribu jiwa (51,08%). Di Situbondo telah menunjukkan bahwa populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Data tersebut menunjukkan populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga hal yang sangat bagus, apabila mereka mendapatkan lapangan kerja untuk membantu perekonomian keluarga, di antaranya dengan melakukan pemberdayaan, pelatihan, dan penyuluhan sehingga bisa bekerja dengan melalui UMKM dan lain sebagainya. Dalam hal angkatan kerja di Situbondo, laki-laki yang bekerja sebanyak 238.708 jiwa (95,56%), pengangguran terbuka sebanyak 8.495 jiwa (3,44%) dari 247.203 jiwa. Sedangkan perempuan yang bekerja sebanyak 195.009 jiwa (97,50%) dan pengangguran dengan jumlah 4.993 (2,50%) jiwa dari 200.002 jiwa. (BPS Situbondo, 2026:62). Perihal ketenagakerjaan, masih didominasi oleh laki, begitu juga pada pengangguran terbuka. Untuk meningkatkan perekonomian keluarga, maka perempuan bisa turut berpartisipasi untuk menambah income keluarga. Pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kegiatan pemberdayaan ini berupa pelatihan, serta diselingi beberapa penyuluhan, salah satunya tentang peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, c) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial dan d) DPA Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

METODE

Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) khususnya untuk perempuan sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat melalui sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha pada peningkatan sektor ekonomi. Salah satu cara untuk mewujudkannya dengan cara pemberian memotivasi yakni dengan cara pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan praktek langsung pada bidang industri serta pemberian bantuan modal, fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah kaum perempuan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial juga untuk kemajuan ekonomi pada keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Ketika perempuan memiliki pendidikan dan kesempatan yang sama, mereka dapat berkontribusi pada bidang ekonomi. Pemberdayaan perempuan dalam upaya kemandirian ekonomi berupa transfer ilmu dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan diadakan di Cazzanova Training Center beralamat Bujuk Teni Kecamatan Panji pada tanggal 27 Oktober - 10 November 2025, dengan tema Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga “Melalui Pelatihan Keterampilan Salon Pada The Cuts Community Situbondo” yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Kerja Sama Dengan Cazzanova Training Center Tahun Anggaran 2025. Peserta kegiatan ini semuanya 10 orang perempuan terdiri dari gadis remaja dan ibu rumah tangga, serta

mendapatkan paket bantuan berupa peralatan potong rambut wanita dan uang saku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) khususnya untuk perempuan sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat melalui sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha pada peningkatan sektor ekonomi. Salah satu cara untuk mewujudkannya dengan cara pemberian memotivasi yakni dengan cara pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan praktek langsung pada bidang industri serta pemberian bantuan modal, fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah kaum perempuan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial juga untuk kemajuan ekonomi pada keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Ketika perempuan memiliki pendidikan dan kesempatan yang sama, mereka dapat berkontribusi pada bidang ekonomi. Pemberdayaan perempuan dalam upaya kemandirian ekonomi berupa transfer ilmu dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan diadakan di Cazzanova Training Center beralamat Bujuk Teni Kecamatan Panji pada tanggal 27 Oktober - 10 November 2025, dengan tema Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga “Melalui Pelatihan Keterampilan Salon Pada The Cuts Community Situbondo” yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Kerja Sama Dengan Cazzanova Training Center Tahun Anggaran 2025. Peserta kegiatan ini semuanya 10 orang perempuan terdiri dari gadis remaja dan ibu rumah tangga, serta mendapatkan paket bantuan berupa peralatan potong rambut wanita dan uang saku.

HASIL DAN PEMBAHASAN Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program-program tersebut di antaranya adalah Program bantuan tunai bersyarat seperti PKH dan BLT Kesra, Bantuan permodalan seperti Ultra Mikro (UMi), Program pemberdayaan ekonomi seperti UPPKS dan gerakan keluarga berdaya, Pemberdayaan UKM, Industri rumah tangga, KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain-lain. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pada kaum perempuan bentuk kegiatannya dapat berupa pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan pemberdayaan para peserta mendapatkan modal, bantuan alat produksi dan peralatan lainnya guna mendukung kegiatan usaha untuk mendapatkan biaya/ongkos jasa. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan di Cazzanova Training Center beralamat Bujuk Teni Kecamatan Panji, pelatihan keterampilan salon pada The Cuts Community Situbondo serta pemberian paket peralatan potong rambut wanita bagi peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai. Peserta kegiatan pelatihan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang kesemuanya adalah perempuan, dimana mereka semua dari Komunitas The Cuts Community Situbondo. Instruktur Pelatihan dari Cazzanova Training Center, terdiri dari Mohammad Hazan, Ratu Maulika Balqis serta dibantu asistennya bernama Bintang Mustika Ratu dan Moh. Fengki. Narasumber untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya berasal dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini yang dilaksanakan agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga, secara umum akan menumbuhkembangkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan berbagai macam bentuknya, di antaranya berupa pendidikan dan pelatihan, workshop, pemberian bantuan modal, bantuan alat produksi. Untuk kegiatan pemberdayaan di Komunitas The Cuts Community Situbondo yang

diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, para peserta mendapatkan bantuan transport sebesar Rp.50.000,00/hari. Selanjutnya masing-masing peserta diberi peralatan untuk potong rambut dan kecantikan. Keluaran (out put) dari pemberdayaan ini, diharapkan mereka yang telah mendapatkan pelatihan potong rambut dan kecantikan ini bisa dapat mandiri untuk menambah atau meningkatkan ekonomi keluarga melalui mindset/attitude kewirausahaan maupun membuka UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Data menunjukkan bahwa terdapat 3.818 UMKM yang terdata di Kabupaten Situbondo, tentu hal ini memiliki potensi UMKM yang besar dan beragam mulai dari kerajinan, makanan dan minuman dan beberapa industri kecil lainnya. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dapat bergerak di hampir semua sektor ekonomi. Kategori utamanya meliputi kuliner, fesyen, agribisnis, perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Usaha ini dikelompokkan berdasarkan omzet tahunan atau jumlah modal. Kegiatan di Cazzanova Training Center UMKM bertujuan agar setelah melakukan pelatihan, peserta akan berpikir dan melaksanakan kegiatan bisnis untuk menambah income keluarga, maksudnya dapat mencari uang melalui hasil pelatihan yang berhubungan dengan perawatan atau layanan yang berfokus pada kecantikan. Di antaranya adalah perawatan atau pangkas rambut, make up, kecantikan. Harapannya adalah mereka diharapkan akan membuka kios atau tempat usaha di bidang perawatan rambut dan kecantikan, dengan demikian akan mendapat penghasilan dari usaha tersebut. UMKM di Situbondo memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Situbondo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM di Situbondo, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ada 13.818 UMKM yang terdata di Kabupaten Situbondo, tentu hal ini memiliki potensi

UMKM yang besar dan beragam. Dengan adanya kegiatan-kegiatan pelatihan seperti halnya yang telah diprakarsai oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yang bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun Badan Latihan Kerja atau tempat-tempat magang seperti Cazzanova Training Center dengan Pelatihan Keterampilan Salon Pada The Cuts Community Situbondo, maka nantinya akan muncul jiwa, mindset dan perilaku kewirausahaan bagi para pesertanya. Terbentuknya entrepreneur mindset bagi perempuan merupakan salah satu hasil dari pelatihan sehingga pesertanya akan berdaya, dampak lainnya adalah muncul kemampuan untuk bisa lebih mandiri. Pemberdayaan adalah upaya memberi kemampuan khususnya juga pada perempuan agar mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga dapat mengatur dirinya serta dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dirinya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya para perempuan sangat diperlukan guna kemandirian dalam peningkatan ekonomi keluarga dengan melalui pengelolaan sumberdaya yang ada dalam dirinya. Pemberdayaan dalam bentuk pelatihan maupun penyuluhan yang difasilitasi dinas maupun perguruan tinggi, diharapkan terjadinya sinergitas untuk menguatkan kemandirian para ibu-ibu untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan khususnya sektor peningkatan ekonomi keluarga di bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan gender, kemandirian organisasi perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak, salah satunya seperti pelatihan potong

rambut dan perawatannya di Cazzanova Training Center. Pemberdayaan perempuan akan lebih optimal apabila mampu secara mandiri dalam mengelola potensi pengembangan sumberdaya manusianya seperti perawatan atau layanan yang berfokus pada kecantikan, di antaranya adalah perawatan atau pangkas rambut, make up, kecantikan. dengan dilandasi jiwa kewirausahaan lalu diterapkan dengan membuka salon/tempat pangkas rambut dan kecantikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 2. Dr. Nanda Widaninggar, S.E., M.Ak., Ak., CA., CIQaR. selaku Kepala LP2M Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 3. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos.,M.Si, selaku Dekan Fisip Unars Situbondo 4. Ir. H. Timbul Surjanto, M.M, Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo. 5. Mohammad Hazan selaku instruktur dan pemilik Cazzanova Training Center Bujukteni Panji serta instruktur Ratu Maulika Balqis,

DAFTAR PUSTAKA

- (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>)
- Adim, Abd. 2024. Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2018-2022. IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science, Vol 5 No 2 November 2024. E-ISSN: 2798-0413,P-ISSN :2798-0111
- Arifuddin, Ade Ariswildani, Rukmawaty Muta'al, Hamka Amir. 2023. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Masyarakat Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology. Vol. 1 No. 1 tahun 2023
- BPS Situbondo, 2026

- Ghinastri, S. L & Syafitri, W. 2024. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (MK) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*. Volume 03, Number 1, Pages 72-83. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.6>
- Gulo, Juniasti. 2025. Identifikasi Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia Melalui Pendekatan Regresi Linier Berganda. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*. Volume.4, Nomor. 2 Mei 2025. Demak: Pusat Riset dan Inovasi Nasional. Lembaga Pengembaga Kinerja Dosen (LPKD).
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2547/november-2025--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-74-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html>
- <https://www.instagram.com/reel/DSrjP8VgSH/?hl=id>
- [https://www.wapresri.go.id/atasi-kemiskinan-dengan-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/#:~:text=%E2%80%9CMenghilangkan%20kemiskinan%20hanya%20dengan%20bantuan%20sosial%20tidak,itu%20perlu%20ada%20pemberdayaan%20\(masyarakat\)%20melalui%20pengembangan](https://www.wapresri.go.id/atasi-kemiskinan-dengan-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/#:~:text=%E2%80%9CMenghilangkan%20kemiskinan%20hanya%20dengan%20bantuan%20sosial%20tidak,itu%20perlu%20ada%20pemberdayaan%20(masyarakat)%20melalui%20pengembangan)
- Imanda, Deanisa Dwi. Reva Putri Nurlatifah, Nabila Yuliana, Lina Marlin. 2023. Pengaruh Pengangguran Dan Pembangunan Nasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal Of Economis and Business*. Vol. 1 No. 2 Desember 2023, 74-84.
- Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41–53. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i2.463>
- Padang, Lidyawati dan Murtala. 2019. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Volume VIII Nomor 02 Desember 2019. Universitas Malikussaleh
- Sesmita, Reni. Wiwit Tri Nolya. Yusi Marsa Heriyandini. Yosi Lara Jenita. 2025. Faktor Penyebab Pengangguran dan Kemiskinan serta Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Vol. 1 No. 8 (2025): Menulis: *Jurnal Penelitian Nusantara*. Published By : PT. Padang Tekno Corp. Kab. Asahan, Sumatera Utara

Setyaningsih, Hana, Endah Vestikowati, Erlan Suwarlan. 2022. Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kabupaten Ciamis Tahun 2021. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 No. 1 Januari- Juni 2022.

Suaib dan Aryulhandy Nur Zulhijjah.2024. *Pembangunan Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Inteligencia Media

Sukirno, Sadono. 2007. *Makro ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.

UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional

Zakiyah, 2010 dalam <https://www.researchgate.net/publication/362252947> Model_Pemberdayaan_Perempuan#pf39).

***PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GURU PAUD
MELALUI PENGUATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN KE-
ASWAJAHAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER ANAK USIA DINI***

***HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD
TEACHERS THROUGH STRENGTHENING THE COMPETENCE OF
EARLY CHILDHOOD LEARNING IN BUILDING EARLY CHILDHOOD
CHARACTER***

Nina Sa'idah Fitriyah¹⁾, Ilmiyah²⁾, Rofiatur Rohima³⁾

^{1,2,3}Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Abdurachman Saleh Situbondo

Email : ninasaidah@unars.ac.id

Abstrak: Pengembangan sumber daya manusia guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada anak usia dini. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks lembaga pendidikan berbasis Nahdlatul Ulama adalah penguatan kompetensi pembelajaran Ke-Aswajaan yang menanamkan nilai-nilai tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru PAUD dalam mengintegrasikan nilai-nilai Ke-Aswajaan ke dalam proses pembelajaran untuk membangun karakter anak usia dini. Kegiatan dilaksanakan pada guru-guru PAUD di Kabupaten Situbondo dengan jumlah peserta 30 orang. Metode yang digunakan adalah pelatihan partisipatif melalui sosialisasi, workshop penyusunan perangkat pembelajaran, praktik mengajar (microteaching), pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman guru mengenai konsep Ke-Aswajaan, kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) berbasis nilai Aswaja, serta keterampilan menerapkan pembelajaran yang menanamkan karakter religius, toleran, disiplin, dan peduli sosial pada anak. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia guru PAUD sekaligus mendukung penguatan pendidikan karakter sejak usia dini.

Kata Kunci: Sumber daya manusia, guru PAUD, Ke-Aswajaan, Pendidikan karakter, Anak usia dini.

Abstract: The development of human resources for early childhood education (PAUD) teachers is an important factor in improving the quality of character education in early childhood. One of the relevant approaches in the context of Nahdlatul Ulama-based educational institutions is the strengthening of Ke-Aswajaan learning competencies that instill the values of tawassuth, tawazun, tasamuh, and i'tidal. This community service activity aims to improve the competence of PAUD teachers in integrating Ke-Aswajaan values into the learning process to build early childhood character. The activity was carried out for PAUD teachers in Situbondo Regency with a total of 30 participants. The methods used are participatory training through socialization, workshops on the preparation of learning tools, teaching practices (microteaching), mentoring, and evaluation. The results of the activity showed an increase in teachers' understanding of the concept of Ke-Aswajaan, the ability to prepare a Daily Learning Implementation Plan (RPPH) based on Aswaja values, and the skills to implement learning that instills religious, tolerant, disciplined, and social care in children. This activity contributes to the development of human resources for PAUD teachers while supporting the strengthening of character education from an early age.

Keywords: human resources, early childhood teachers, Ke-Aswajaan, character education, early childhood.

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap awal dalam sistem pendidikan yang memiliki peranan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sejak dini. Periode usia 0–6 tahun sering disebut sebagai *golden age* karena pada fase ini terjadi perkembangan yang sangat pesat pada aspek kognitif, bahasa, sosial-emosional, moral, spiritual, dan fisik anak. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sebagian besar perkembangan otak terjadi pada rentang usia tersebut

sehingga stimulasi yang tepat akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan perkembangan anak pada jenjang pendidikan berikutnya (Direktorat PAUD, 2022; Suyadi, 2020). Oleh sebab itu, mutu layanan PAUD sangat bergantung pada kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak.

Guru PAUD memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses pendidikan karena tidak hanya bertugas mengembangkan aspek akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik sejak usia dini. Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial yang semakin cepat, guru dihadapkan pada tantangan untuk membentuk karakter anak agar memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta kemampuan berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Dengan demikian, proses pembelajaran di PAUD perlu dirancang tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial dalam setiap kegiatan belajar (Lickona, 2013; Kemendikbudristek, 2022).

Bagi lembaga PAUD yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, implementasi nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah (Ke-Aswajaan) menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam membangun karakter peserta didik. Nilai-nilai Ke-Aswajaan seperti tawassuth (bersikap moderat), tawazun (menjaga keseimbangan), tasamuh (mengembangkan sikap toleran), i'tidal (berlaku adil), serta semangat *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan prinsip-prinsip yang

dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tidak hanya memperkuat identitas keagamaan peserta didik, tetapi juga mendukung pembentukan karakter yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional serta dimensi Profil Pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, dan menghargai keberagaman (PBNU, 2018).

Meskipun demikian, hasil identifikasi kebutuhan yang dilakukan sebelum pelaksanaan program pengabdian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran Ke-Aswajaan pada beberapa lembaga PAUD di Kabupaten Situbondo masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan guru, ditemukan bahwa sebagian besar pendidik telah memahami konsep dasar Ke-Aswajaan, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam perangkat pembelajaran maupun praktik pembelajaran di kelas. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) umumnya belum memasukkan indikator karakter berbasis nilai Aswaja secara sistematis. Selain itu, kegiatan pembelajaran masih didominasi oleh pembiasaan membaca doa, hafalan, dan kegiatan keagamaan rutin tanpa dikembangkan menjadi pengalaman belajar yang mampu menanamkan sikap toleransi, moderasi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial secara kontekstual.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemahaman konseptual guru mengenai Ke-Aswajaan dengan kemampuan praktis dalam mengimplementasikannya di kelas. Kondisi ini diperkuat oleh terbatasnya pelatihan maupun pendampingan yang secara khusus membahas strategi pembelajaran Ke-Aswajaan bagi guru PAUD. Akibatnya, sebagian guru

masih mengalami kesulitan dalam memilih metode, media, dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini sekaligus mampu menginternalisasikan nilai-nilai Aswaja secara menyenangkan. Padahal, pembelajaran pada jenjang PAUD seharusnya dilaksanakan melalui pendekatan bermain, bercerita (*storytelling*), pembiasaan, proyek sederhana, eksplorasi lingkungan, dan pengalaman langsung yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak (Direktorat PAUD, 2022; Suyadi, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan sumber daya manusia guru PAUD perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai Ke-Aswajaan ke dalam proses pembelajaran secara terencana dan berkesinambungan. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga guru tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga mampu menumbuhkan karakter religius, toleransi, kedisiplinan, tanggung jawab, gotong royong, dan kepedulian sosial melalui berbagai aktivitas belajar yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

Sebagai upaya menjawab kebutuhan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan program "Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru PAUD melalui Penguatan Kompetensi Pembelajaran Ke-Aswajaan dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini." Kegiatan ini dirancang dalam bentuk pelatihan, lokakarya penyusunan perangkat pembelajaran, pendampingan implementasi RPPH berbasis Ke-Aswajaan, praktik *microteaching*, serta evaluasi hasil pembelajaran. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Aswaja secara sistematis sehingga mampu memperkuat pendidikan karakter anak usia dini.

Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan lahir model pembelajaran Ke-Aswajaan yang praktis, aplikatif, dan mudah diterapkan oleh guru PAUD, khususnya pada lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Selain meningkatkan profesionalisme guru, model tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu strategi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter, religius, moderat, dan berdaya saing melalui pendidikan anak usia dini.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan pada guru-guru PAUD yang berada dalam naungan PC Muslimat NU Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Situbondo dengan jumlah peserta sebanyak ± 45 guru PAUD. Pemilihan sasaran didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah memahami konsep dasar Ke-Aswajaan, namun masih mengalami kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari menggunakan pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam seluruh proses pelatihan, praktik, refleksi, dan pendampingan. Pendekatan PLA dipilih karena memungkinkan guru tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mengembangkan keterampilan melalui pengalaman langsung, diskusi, simulasi, praktik mengajar (*microteaching*), serta penyusunan perangkat pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas.

Secara umum, tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas lima tahap, yaitu: (1) identifikasi kebutuhan, (2) persiapan program, (3) pelaksanaan pelatihan, (4) pendampingan implementasi, dan (5) evaluasi kegiatan.

1. Tahapan Identifikasi Kebutuhan

Tahap ini bertujuan mengidentifikasi kondisi awal kompetensi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran Ke-Aswajaan. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa permasalahan utama, yaitu:

- 1) guru belum memiliki perangkat pembelajaran Ke-Aswajaan yang terstruktur;
- 2) implementasi nilai Aswaja masih terbatas pada kegiatan pembiasaan ibadah;
- 3) metode pembelajaran karakter belum bervariasi;
- 4) media pembelajaran berbasis nilai Aswaja masih sangat terbatas;
- 5) guru belum memiliki pengalaman melakukan pembelajaran berbasis proyek dan bermain yang mengintegrasikan nilai Ke-Aswajaan.

Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan materi pelatihan dan modul pendampingan.

2. Persiapan Program

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) koordinasi dengan mitra mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan;
- 2) penyusunan modul pelatihan Ke-Aswajaan bagi guru PAUD;
- 3) penyusunan instrumen pre-test dan post-test;
- 4) penyiapan media presentasi, video pembelajaran, alat permainan edukatif (APE), serta contoh perangkat pembelajaran.

3. Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi, praktik, dan refleksi. Kegiatan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta mengenai pembelajaran Ke-Aswajaan.

Materi pelatihan meliputi:

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru PAUD

- konsep pengembangan kompetensi guru;
- kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian;
- guru sebagai agen pembentukan karakter anak.

2) Konsep Dasar Ke-Aswajaan

- pengertian Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
- nilai tawassuth, tawazun, tasamuh, i'tidal, dan *amar ma'ruf nahi munkar* ;
- relevansi nilai Aswaja dalam pendidikan anak usia dini.

3) Strategi Pembelajaran Ke-Aswajaan

- pembelajaran berbasis bermain;
- *storytelling*;
- pembiasaan karakter;
- lagu dan permainan edukatif;
- proyek sederhana;
- pengembangan media pembelajaran.

4) Workshop Penyusunan RPPH Berbasis Ke-Aswajaan

Peserta secara berkelompok menyusun perangkat pembelajaran yang memuat:

- tujuan pembelajaran;
- indikator perkembangan anak;
- kegiatan pembukaan;
- kegiatan inti;
- kegiatan penutup;
- asesmen perkembangan karakter.

Setelah workshop, peserta melaksanakan praktik pembelajaran (*microteaching*) menggunakan perangkat yang telah disusun. Setiap kelompok memperoleh kesempatan untuk:

- menyampaikan tujuan pembelajaran;
- menggunakan media pembelajaran;
- menerapkan metode bermain;
- mengintegrasikan nilai Ke-Aswajaan;
- melakukan asesmen perkembangan karakter anak.

Selama praktik berlangsung, tim pengabdian melakukan observasi menggunakan lembar penilaian yang mencakup beberapa aspek, yaitu:

Aspek Penilaian	Indikator
Perencanaan pembelajaran	Kesesuaian RPPH dengan Kurikulum Merdeka
Integrasi nilai Aswaja	Nilai Aswaja muncul dalam kegiatan pembelajaran
Metode pembelajaran	Bermain, bercerita, diskusi, pembiasaan
Penggunaan media	Kreatif dan sesuai usia anak
Komunikasi guru	Interaktif dan menyenangkan

Aspek Penilaian	Indikator
Penilaian karakter	Guru mampu melakukan observasi perkembangan karakter

Setelah praktik, tim memberikan umpan balik (feedback) dan rekomendasi perbaikan kepada setiap peserta.

Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur menggunakan indikator berikut.

Indikator	Target Keberhasilan
Kehadiran peserta	≥ 90%
Peningkatan nilai post-test	≥ 20% dibanding pre-test
Kemampuan menyusun RPPH berbasis Ke-Aswajaan	≥ 85% peserta berkategori baik
Kemampuan <i>microteaching</i>	≥ 80% peserta berkategori baik
Tingkat kepuasan peserta	≥ 85% menyatakan puas
Komitmen implementasi di sekolah	≥ 90% peserta siap menerapkan hasil pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru PAUD melalui Penguatan Kompetensi Pembelajaran Ke-Aswajaan dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini" dilaksanakan di Kabupaten Situbondo dengan melibatkan ±45 guru PAUD sebagai peserta. Kegiatan berlangsung selama dua hari melalui pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) yang mengombinasikan pelatihan, diskusi, workshop, praktik *microteaching*, dan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai konsep Ke-Aswajaan, strategi pembelajaran berbasis karakter, serta kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). Selanjutnya peserta memperoleh materi mengenai konsep dasar Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, pengembangan sumber daya manusia guru PAUD, strategi pembelajaran aktif, serta integrasi nilai-nilai Ke-Aswajaan ke dalam Kurikulum Merdeka. Pada tahap berikutnya peserta mengikuti workshop penyusunan perangkat pembelajaran dan praktik mengajar (*microteaching*), kemudian kegiatan diakhiri dengan post-test, refleksi, dan evaluasi.



Gambar 1 Penyampaian Materi kepada Guru PAUD dibawah naungan YPMNU

Selama penyampaian materi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari aktifnya peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab mengenai implementasi nilai-nilai tawassuth, tasamuh, tawazun, dan i'tidal ke dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini. Interaksi yang terjadi selama pelatihan menunjukkan

bahwa guru memiliki kebutuhan untuk memperoleh contoh konkret dalam mengintegrasikan nilai-nilai Ke-Aswajaan ke dalam perangkat pembelajaran dan praktik pembelajaran di kelas.

1) Peningkatan Pengetahuan Guru tentang Pembelajaran Ke-Aswajaan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan guru mengenai konsep Ke-Aswajaan dan implementasinya dalam pembelajaran anak usia dini. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta memahami Ke-Aswajaan hanya sebagai materi keagamaan yang disampaikan melalui pembiasaan membaca doa, hafalan surat pendek, atau praktik ibadah. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mulai memahami bahwa nilai-nilai tawassuth, tasamuh, tawazun, dan i'tidal dapat diintegrasikan ke dalam seluruh aktivitas pembelajaran melalui kegiatan bermain, bercerita, bernyanyi, pembiasaan, maupun proyek sederhana.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test

Aspek Penilaian	Pre-test	Post-test	Peningkatan
Pemahaman konsep Ke-Aswajaan	61,8	89,5	27,7
Integrasi nilai karakter	59,4	87,3	27,9
Penyusunan RPPH berbasis Aswaja	56,7	86,8	30,1
Strategi pembelajaran aktif	60,5	88,4	27,9
Rata-rata	59,6	88,0	28,4

Terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 28,4 poin, yang menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman konseptual guru. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik mampu meningkatkan kapasitas

guru dalam memahami hubungan antara nilai-nilai Ke-Aswajaan dan pendidikan karakter. Temuan ini sejalan dengan pendapat Lickona (2013) bahwa pendidikan karakter akan lebih efektif apabila nilai-nilai moral diintegrasikan ke dalam seluruh aktivitas pembelajaran, bukan hanya diajarkan sebagai materi tersendiri.

2) Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran

Salah satu luaran utama kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran berbasis Ke-Aswajaan. Sebelum pelatihan, sebagian besar RPPH yang disusun guru belum mencantumkan indikator karakter secara eksplisit, dan kegiatan pembelajaran masih berfokus pada pengembangan aspek kognitif. Setelah memperoleh pendampingan, guru mampu menyusun RPPH yang mengintegrasikan tujuan pembelajaran, indikator perkembangan anak, metode pembelajaran, media edukatif, serta asesmen karakter yang selaras dengan nilai-nilai Ke-Aswajaan.

Sebagai contoh, nilai tasamuh diterapkan melalui kegiatan bermain kelompok yang mengajarkan anak untuk menghargai teman yang berbeda kemampuan. Nilai tawassuth diintegrasikan melalui pembiasaan menyelesaikan konflik dengan musyawarah, sedangkan nilai tawazun diwujudkan dalam pengaturan kegiatan belajar dan bermain secara seimbang. Sementara itu, nilai i'tidal ditanamkan melalui pembiasaan berlaku adil dalam pembagian tugas dan penggunaan alat permainan edukatif.

Hasil penilaian perangkat pembelajaran menunjukkan bahwa 87% guru mampu menyusun RPPH berbasis Ke-Aswajaan dengan kategori baik, sedangkan 1

3% berada pada kategori cukup dan masih memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam menyusun indikator asesmen karakter.

3) Implementasi Pembelajaran melalui Microteaching

Tahap *microteaching* menjadi bagian penting dalam kegiatan pengabdian karena memberikan kesempatan kepada guru untuk mempraktikkan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Selama kegiatan, setiap kelompok guru mempresentasikan proses pembelajaran yang memadukan metode bermain, *storytelling*, bernyanyi, penggunaan media edukatif, dan pembiasaan perilaku positif.

Hasil observasi menunjukkan bahwa guru telah mampu mengimplementasikan nilai-nilai Ke-Aswajaan dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Misalnya, kegiatan bercerita tentang kisah keteladanan digunakan untuk menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab, sedangkan permainan kelompok dimanfaatkan untuk mengembangkan kerja sama, kepedulian, dan toleransi. Penggunaan metode yang bersifat partisipatif membuat suasana pembelajaran lebih interaktif dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

Tabel 2. Hasil Observasi Praktik Microteaching

Aspek yang Dinilai	Persentase Kategori Baik (%)
Penguasaan materi	90
Integrasi nilai Ke-Aswajaan	88
Penggunaan metode pembelajaran	85
Penggunaan media edukatif	84
Komunikasi dengan anak	92
Penilaian perkembangan karakter	83
Rata-rata	87

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah memiliki kemampuan yang baik dalam menerapkan pembelajaran berbasis Ke-Aswajaan,

meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek penilaian perkembangan karakter anak.

4) Dampak terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru

Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kompetensi guru sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif, menggunakan media edukatif, mengembangkan metode pembelajaran aktif, serta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.

Selain peningkatan kompetensi pedagogik, kegiatan ini juga mendorong berkembangnya kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian guru. Diskusi kelompok dan praktik kolaboratif selama pelatihan membangun budaya saling berbagi pengalaman, bertukar ide, dan menyusun solusi bersama terhadap berbagai permasalahan pembelajaran.

Pengembangan sumber daya manusia guru melalui pelatihan berkelanjutan merupakan investasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik dan karakter yang baik akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter peserta didik secara optimal.

5) Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan didukung oleh antusiasme peserta, dukungan lembaga mitra, kesiapan tim pengabdian, serta penggunaan metode pelatihan yang bersifat partisipatif. Kegiatan *microteaching* dan workshop

memberikan kesempatan kepada guru untuk belajar melalui pengalaman langsung sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung lebih efektif.

Di sisi lain, beberapa kendala juga ditemukan selama pelaksanaan kegiatan. Waktu pelatihan yang relatif singkat menyebabkan praktik pembelajaran belum dapat dilakukan secara mendalam oleh seluruh peserta. Selain itu, kemampuan awal guru yang beragam memerlukan pendampingan dengan intensitas yang berbeda. Beberapa lembaga PAUD juga masih memiliki keterbatasan media pembelajaran sehingga diperlukan inovasi dalam memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar.

Meskipun demikian, kendala tersebut tidak mengurangi efektivitas program karena seluruh peserta mampu menyelesaikan tahapan pelatihan dan menghasilkan perangkat pembelajaran yang dapat diimplementasikan di lembaga masing-masing.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa :

- 1) Penguatan kompetensi pembelajaran Ke-Aswajaan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam pengembangan sumber daya manusia guru PAUD.
- 2) Peningkatan kompetensi guru berdampak pada kualitas pembelajaran yang lebih terencana, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter anak usia dini. Model pelatihan yang dikembangkan dalam program ini juga berpotensi direplikasi pada lembaga PAUD lainnya, khususnya yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran.

- 3) Pengabdian ini memberikan manfaat dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penguatan pendidikan karakter sejak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat PAUD. (2022). *Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Kemendikbudristek.
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2018). *Pedoman Implementasi Nilai-Nilai Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*. PBNU.
- Suyadi. (2020). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*. PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.